



unitrend

Menuju Transisi Energi: Pesan Rakyat Untuk Presiden Masa Depan



Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 1.245 responden yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam survei kami.



Penelitian ini dilaksanakan melalui kerjasama antara *Center of Economic and Law Studies (CELIOS)* dan *Unity of Trend (UniTrend)*. Media Wahyudi Askar, Ignatius Ardhana, Bhima Yudhistira Adhinegara dan Erythrina Orié berperan sebagai penulis dan mengembangkan ide, pendapat, serta gagasan dalam studi ini. Data survey dan laporan dalam studi ini dikumpulkan, dianalisis, dan divisualisasikan oleh Kayla Queenazima Santoso. Diah Ayu Widyati sebagai data analyst. Selain itu, data media monitoring dengan pengambilan data scrapping media massa daring dilakukan oleh Mochamad Satria.

Studi ini mendapat banyak kontribusi dari berbagai sumber daya yang diperuntukan dalam pengumpulan data primer penelitian, pengolahan, hingga analisis data menjadi hasil yang berkualitas dan informatif. Kontribusi lainnya diberikan oleh Rizki Ardinanta, dan Bara Setiadi terkait sumbangsih mereka dalam melakukan revisi dan evaluasi terhadap laporan yang telah disusun.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Mohammad Arifin atas kontribusinya dalam merancang tampilan akhir dari laporan ini. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif melalui kajian dan diskusi mengenai posisi isu lingkungan di tengah kontestasi pemilu 2024.

“

Era pemanasan global
telah berakhir,
dan era pendidihan global
telah tiba.

António Guterres
Sekjen PBB



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2024, isu krisis iklim di Indonesia akan menjadi salah satu topik yang penting dalam pemilihan calon presiden (capres). Krisis iklim telah menjadi perhatian masyarakat selama beberapa tahun terakhir, karena meningkatnya intensitas bencana alam, dan kerugian dari sisi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah signifikan guna menghadapi tantangan besar terkait masalah ini. Peran pemimpin yang memiliki visi dan misi kuat dalam menyusun *road map* strategi berkelanjutan merupakan kunci dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin mendesak ini.



Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terkait krisis iklim yang sejak lama dirasakan. Studi ini mencakup empat pertanyaan penelitian utama untuk menjawab berbagai aspek persepsi masyarakat mengenai isu lingkungan dan bagaimana media massa berperan dalam menyuarakan isu ini. Terdapat setidaknya empat substansi hasil penelitian diantaranya, 1) pandangan dan sikap masyarakat terhadap krisis iklim yang sedang terjadi di Indonesia, 2) pandangan masyarakat tentang peran dan kinerja pemerintah dalam mengatasi krisis iklim di Indonesia, 3) studi ini berusaha mencari tahu terkait komitmen tiga calon presiden terhadap penyelesaian krisis iklim, dan 4) peran media massa dalam menyuarakan isu lingkungan di Indonesia.

Secara umum, 81% masyarakat Indonesia setuju bahwa pemerintah perlu mendeklarasikan kondisi darurat iklim. Jika dilihat dari daerah tempat tinggalnya, masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan (89%) dan pinggiran kota (88%) cenderung lebih setuju jika pemerintah mendeklarasikan kondisi darurat iklim dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan (74%). Studi ini menemukan bahwa Generasi Z dan Millennial dengan rentang usia 15-34 tahun paling banyak berpersepsi bahwa krisis iklim adalah hal yang nyata. Hasil lain, sebanyak 5% responden dari rentang usia 45-54 tahun menjawab bahwa krisis iklim tidak nyata. Lebih lanjut, 60% masyarakat menilai pemerintah belum mampu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah krisis iklim di Indonesia.

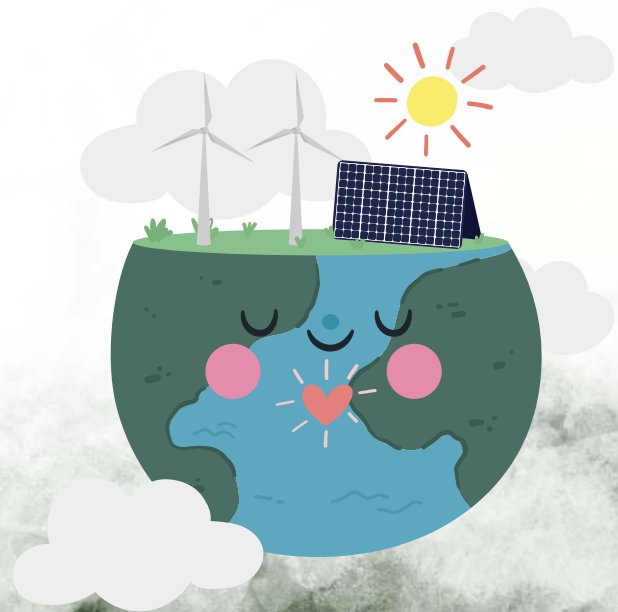
Studi terkait peran media daring menunjukkan bahwa CNN Indonesia dan Seputar Indonesia (Sindo) menjadi media berita yang paling banyak memberitakan isu lingkungan dan krisis iklim (32%). Diikuti dengan media massa lain seperti Sindo (30%), INews (22%), Detik (11%), dan Kompas (5%). Dengan kata lain, jangkauan pemberitaan mengenai krisis iklim dan transisi energi masih perlu ditingkatkan sehingga perbedaan proporsi pemberitaan antara media daring satu dan lainnya tidak terlalu jauh.

Studi ini juga menunjukkan, Anies Baswedan menjadi calon presiden yang paling banyak dinilai masyarakat memiliki kepekaan terhadap isu lingkungan diikuti Ganjar Pranowo (23%) dan Prabowo Subianto (14%). Dalam konteks sosial media kajian ini berusaha mengamati sekaligus memahami jejaring aktor dan sentimen publik mengenai isu transisi energi. Topik perbincangan mengenai isu transisi energi dan lingkungan menghasilkan setidaknya empat komunitas besar pada platform media sosial Twitter. Seluruh topik tersebut mendominasi masing-masing komunitas berdasarkan aktor sentral, seperti @dianparamita, @Mythicalforest, @PartaiSocmed, dan @GreenpaceID.

Temuan hasil studi lainnya menangkap sentimen berita dari masing-masing tokoh tersebut diantaranya, Anies memperoleh sentimen positif sebesar 84%, Ganjar 44%, dan Prabowo 89%. Selanjutnya, sentimen negatif yang diperoleh Anies sebesar 8%, Ganjar 44%, dan Prabowo 11%. Pendekatan sentimen bertujuan untuk melihat respon mengenai persepsi pemberitaan yang dilakukan media kepada ketiga calon presiden tersebut terhadap isu-isu lingkungan.

Menanggapi temuan tersebut, studi ini mengusulkan beberapa rekomendasi kepada pemangku kepentingan seperti Partai Politik, Kandidat Calon Presiden, Tim Pemenangan, dan KPU :

- 1 Para kontestan di pemilu 2024, baik calon Presiden, maupun calon legislatif agar memiliki komitmen dan program yang riil terkait transisi energi, pencegahan deforestasi dan kebakaran hutan.
- 2 Menempatkan isu lingkungan sebagai isu prioritas dalam agenda pemilu termasuk debat konstan Pilpres dan pemilu legislatif.
- 3 Memiliki komitmen untuk mendukung alternatif skema pembiayaan proyek yang berkelanjutan secara kreatif tanpa meninggalkan aspek kehati-hatian, seperti penerbitan *green bond*, *debt for climate*, *debt restructuring*, dan kolaborasi dengan lembaga filantropis.
- 4 Merevisi berbagai regulasi yang berdampak negatif bagi perlindungan lingkungan hidup maupun spesifik transisi energi seperti UU Cipta Kerja, Perpres 112/2022 yang masih memberikan ruang pembangunan PLTU batubara di kawasan industri.
- 5 Mendorong pemilih rasional dengan menempatkan isu lingkungan sebagai kriteria selektif pada pemilu 2024.



Daftar Isi

i Ucapan Terimakasih

ii Ringkasan Eksekutif

1 Pendahuluan

Pertanyaan Penelitian ___2

Metodologi ___2

Profil Responden ___4

8 Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Krisis Iklim di Indonesia

Krisis iklim dirasakan hampir di semua daerah di Indonesia ___8

1.1 Generasi Muda Lebih Kritis Mengenai Kebijakan Krisis Iklim ___10

1.2 Perlunya Deklarasi Darurat Iklim di Indonesia ___11

1.3 Mayoritas Masyarakat di Luar Pulau Jawa Menginginkan Penanganan Krisis Iklim yang Lebih Serius ___12

1.4 Masyarakat Rentan Lebih Pesimis dengan Kapasitas Pemerintah Melakukan Transisi Energi ___14

Masyarakat menganggap pemerintah belum memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim ___13

16 Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Keberpihakan Calon Presiden pada Pemilu 2024 mengenai Penyelesaian Krisis Iklim

2.1 Masyarakat Ingin Tahu Gagasan mengenai Krisis Iklim dari Calon Presiden ___17

2.2 Anies Baswedan Menjadi Tokoh Politik Paling Banyak Bicara Isu Lingkungan ___18

2.3 Anies Baswedan Menjadi Calon Presiden Paling Peka terhadap Isu Lingkungan ___19

2.4 Posisi Calon Presiden di Tengah Isu Lingkungan ___20

2.5 Frekuensi Topik Berita Lingkungan yang Ditautkan pada Capres ___21

2.6 Mayoritas Perilaku Pemilih Sangat Rasional terhadap Isu Lingkungan ___22

27 Bagaimana Peran Media Massa dalam Mengangkat Isu Lingkungan di Indonesia

a. Aktor Sentral ___28

b. Aktor Perantara ___29

c. Polarisasi Antar Komunitas ___30

33 Framing Media Online Terkait Isu Lingkungan

41 Rekomendasi Kebijakan

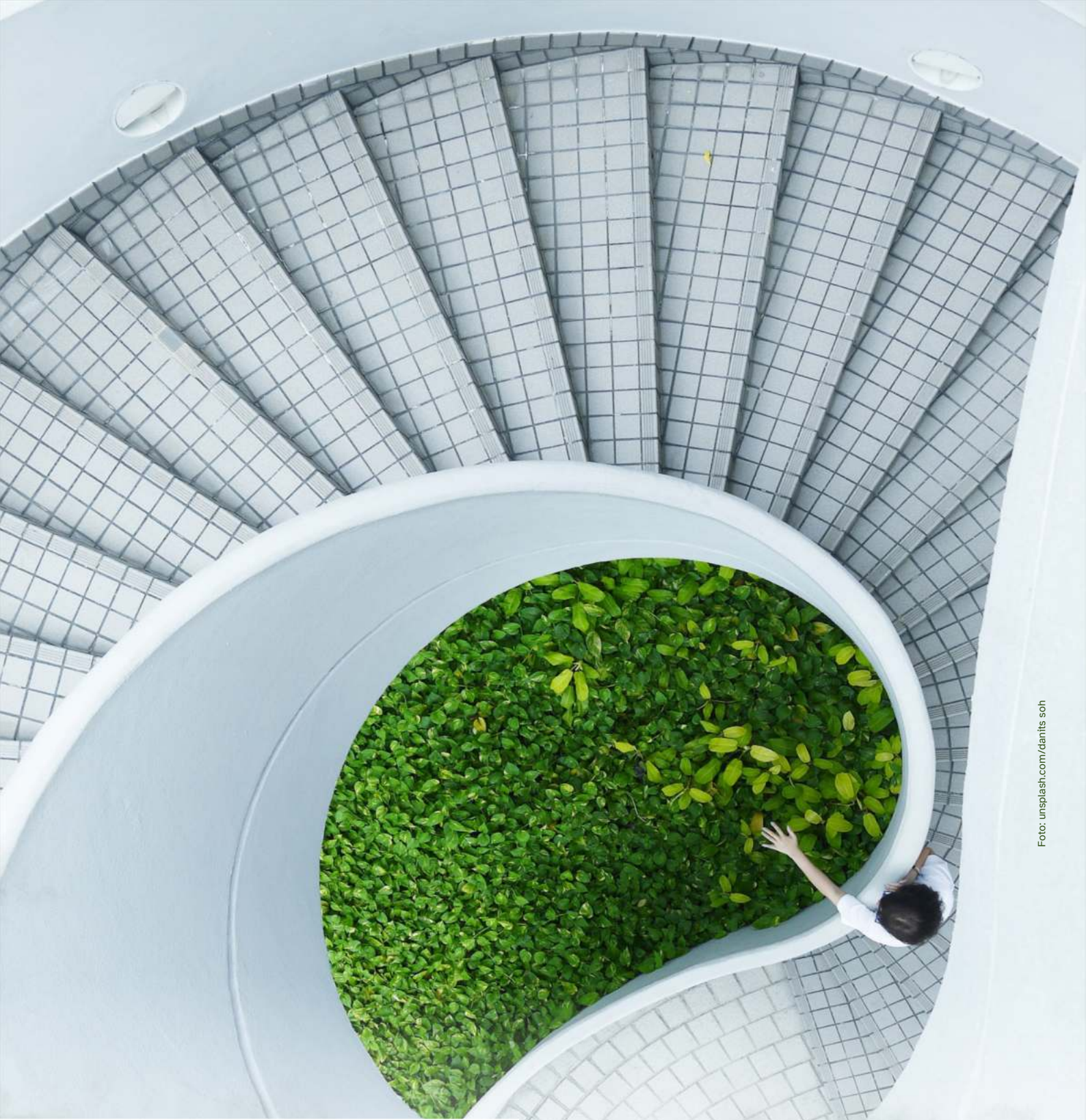


Foto: unsplash.com/danits soh

Pendahuluan



Pendahuluan

Energi memainkan peran krusial dalam pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Namun, penggunaan energi fosil telah menyebabkan konsekuensi serius terhadap lingkungan. Sebagian besar energi listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat masih berasal dari pembakaran batu bara, minyak, dan gas. Sementara bauran energi terbarukan dalam sumber primer energi listrik di Indonesia hanya mencapai 10,4% pada kuartal ke-III 2022¹.



Beragam dampak dari tertundanya transisi energi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem, kerentanan rantai pasok pangan, dan bencana alam. Oleh karena itu, program transisi energi menjadi solusi yang penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama batu bara. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan hidro, namun pemanfaatannya masih terbatas. Dalam upaya mencapai keberlanjutan energi, percepatan pengembangan dan pengadopsian sumber energi terbarukan menjadi hal yang sangat penting.

Hampir 20% dari total pangsa konsumsi energi nasional adalah listrik, dengan 47% masih didominasi oleh batu bara². Namun, perlu diketahui bahwa transisi energi ini tidak dapat dilepaskan dari isu *energy security* dan nasib ribuan orang yang bergantung pada industri pertambangan batu bara.

Dengan kata lain, pemerintah perlu memobilisasi dukungan masyarakat terhadap kebijakan percepatan penutupan PLTU batu bara agar transisi energi dapat terealisasi.

Secara umum, 81% masyarakat Indonesia setuju bahwa pemerintah perlu mendeklarasikan kondisi darurat iklim. Jika dilihat dari daerah tempat tinggalnya, masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan (89%) dan pinggiran kota (88%) cenderung lebih setuju jika pemerintah mendeklarasikan kondisi darurat iklim dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan (74%). Studi ini menemukan bahwa Generasi Z dan Millennial dengan rentang usia 15-34 tahun paling banyak berpersepsi bahwa krisis iklim adalah hal yang nyata. Hasil lain, sebanyak 5% responden dari rentang usia 45-54 tahun menjawab bahwa krisis iklim tidak nyata. Lebih lanjut, 60% masyarakat menilai pemerintah belum mampu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah krisis iklim di Indonesia.

¹ Indonesia Energy Transition Outlook (IETO). 2023

² Indrawan, R. (2021). Hingga Juni 2021 Kapasitas Pembangkit Listrik Indonesia Mencapai 73.341 MW, Komposisi PLTU Mencapai 47%.

Di sisi lain, tantangan transisi energi berada pada komitmen politik para aktor politik dan pemegang kekuasaan negara terhadap penanganan krisis iklim. Menjelang pergantian kepemimpinan nasional diperlukan pengetahuan yang mampu menjelaskan posisi isu lingkungan di mata masyarakat di tengah kontestasi pemilu 2024. Dalam konteks inilah pentingnya politik energi yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan transisi energi juga sangat bergantung pada komitmen politik calon

presiden terhadap perubahan iklim dan krisis iklim. Keberpihakan terhadap penguatan program transisi energi dari Presiden Indonesia berikutnya sangat berperan penting dalam menentukan arah transisi energi di Indonesia. Melalui langkah politik energi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan yang beririsan langsung dengan keadaan ekonomi masyarakat sehingga ikut berperan aktif dalam memitigasi krisis iklim global.

Pertanyaan Penelitian

Krisis iklim merupakan isu bersama karena berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak dan hak asasi manusia. Saat ini, tidak banyak studi yang membahas mengenai dukungan politik dari

masyarakat dan komitmen aktor politik terhadap penyelesaian krisis iklim di Indonesia. Studi ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian diantaranya:



- Bagaimana persepsi masyarakat terhadap krisis iklim di Indonesia?
- Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis iklim di Indonesia?
- Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberpihakan calon presiden pada pemilu 2024 mengenai penyelesaian krisis iklim?
- Bagaimana peran media massa dalam mengangkat isu lingkungan di Indonesia?

Metodologi

Studi ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan pendekatan yang diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 1.245 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan, digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan secara digital atau daring menggunakan teknik *random sampling* yang didasarkan pada representasi nasional. Survei disebar pada tanggal 31 Maret 2023 – 15 April 2023. Facebook Ads dan Instagram Ads digunakan untuk menyebar iklan yang ditargetkan kepada responden berdasarkan kategori topik atau kata kunci, lokasi, minat, usia, dan jenis kelamin.

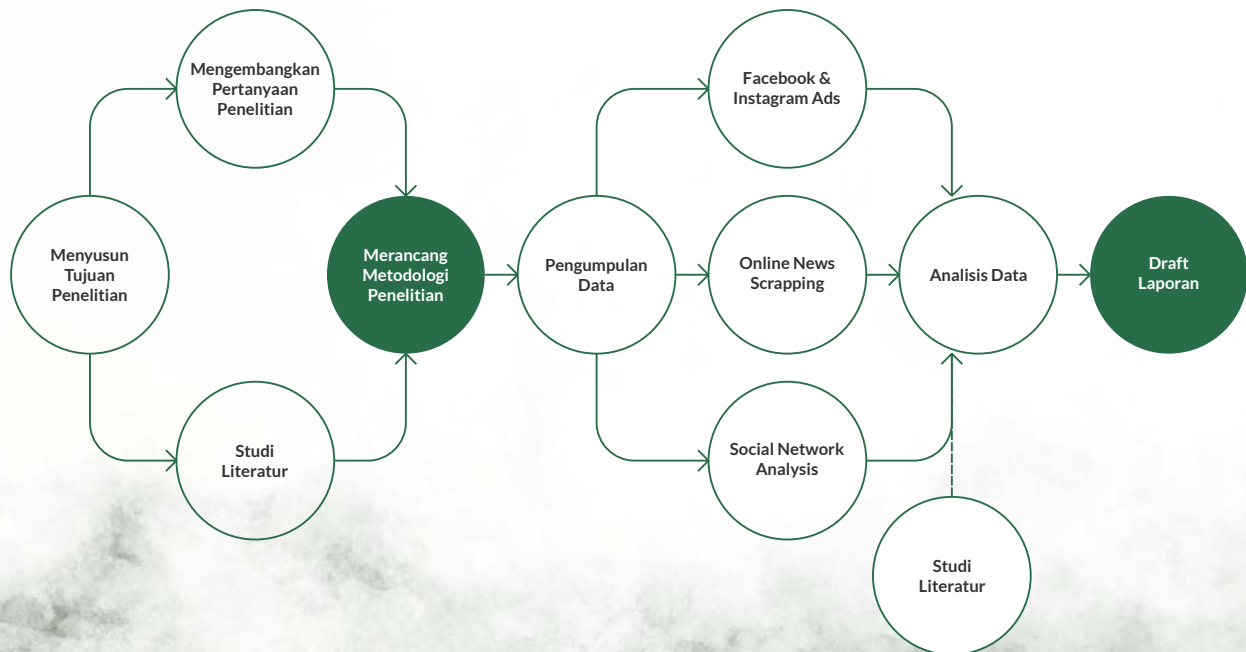
Studi ini menggunakan teknik pembobotan statistik untuk mewakili populasi nasional dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Pembobotan dilakukan berdasarkan variabel gender, usia, provinsi, pendidikan, dan pendapatan dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh dari survei ini kemudian dikombinasikan dengan berbagai data sekunder lainnya mengenai transisi energi di Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyajikan data dalam konteks yang relevan dan mendukung argumentasi yang tepat.

Selain menggunakan metode survei kuantitatif, studi ini juga melakukan *media monitoring* terhadap isu lingkungan yang diambil dari media massa daring dan media sosial Twitter. Masing-masing pengambilan data memiliki metode yang berbeda. Metode scrapping digunakan untuk menganalisis pemberitaan bertema lingkungan dan krisis iklim dari media massa daring, sedangkan *social network analysis* digunakan untuk menganalisis isu transisi energi di Twitter.

Dalam rangka pengumpulan data berita secara *online*, metode scraping digunakan dari rentang waktu 1 November 2022 – 1 Mei 2023. Pertama, sumber berita diidentifikasi, dan kriteria pencarian ditentukan untuk mengekstrak berita yang relevan. Selanjutnya, algoritma scrapping dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengakses situs web setiap platform media, mengekstrak informasi seperti judul, isi berita, tanggal publikasi, pembersihan dan validasi data yang terkumpul. Data yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti mengidentifikasi tren dan menganalisis sentimen.

Metodologi SNA (*Social Network Analysis*) digunakan untuk menganalisis jaringan sosial yang terbentuk di platform Twitter. Pengambilan data Twitter dilakukan mulai dari 1 Maret 2023 – 27 Mei 2023. Proses dimulai dengan pengumpulan data dari API Twitter, yang mencakup informasi seperti pengguna Twitter, tweet, retweet, mention, dan hubungan jaringan antara pengguna. Setelah jaringan terbentuk, analisis jaringan dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik seperti derajat keterhubungan, derajat sentralitas, dan deteksi komunitas. Metrik ini membantu mengidentifikasi pengguna yang paling berpengaruh, koneksi antara pengguna, serta kelompok-kelompok yang signifikan dalam jaringan. Hasil analisis jaringan disajikan melalui visualisasi graf mengenai hubungan antara pengguna Twitter dan pola interaksi sosial. Dengan menggunakan pendekatan SNA, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika jaringan sosial, pengaruh pengguna, dan pola interaksi dalam komunitas online di platform Twitter.

Gambar 1. Metode Penelitian



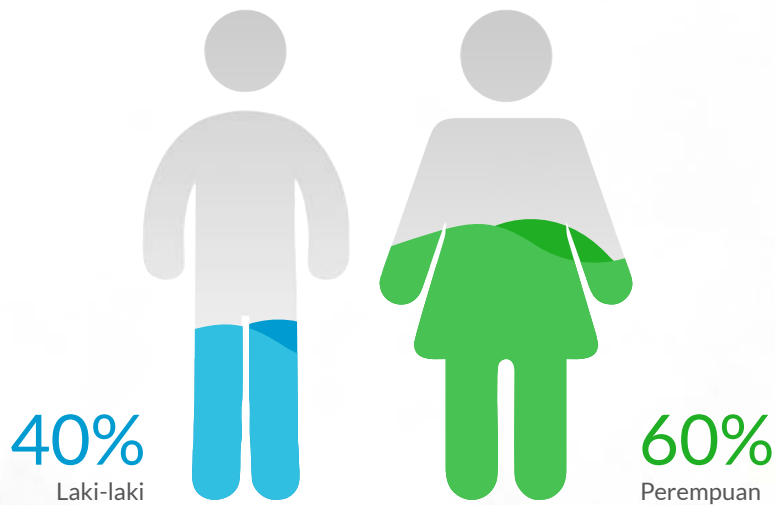
Profil Responden

Mayoritas peserta survei adalah perempuan, dengan persentase sekitar 60%, sementara sisanya merupakan laki-laki. Sebagian besar peserta (48%) berasal dari daerah perkotaan, diikuti oleh perdesaan (29%) dan pinggiran kota (23%). Responden tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Mayoritas peserta survei berdomisili di provinsi Jawa Barat (26%), Jawa Tengah (16%), Jawa Timur (15%), dan DKI Jakarta (13%).

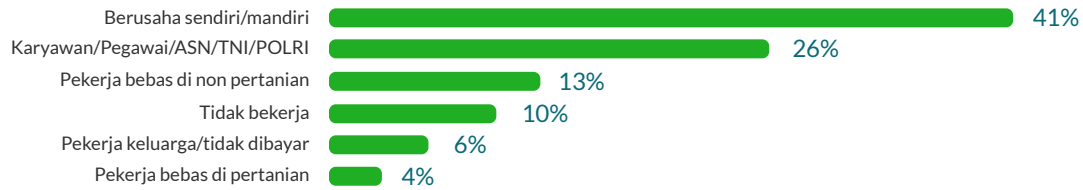
Berdasarkan usia peserta survei, studi ini memiliki median usia 31 tahun dengan mayoritas peserta berada dalam rentang usia 25-34 tahun, yaitu sekitar 48%. Sekitar 43% peserta memiliki pendidikan terakhir pada tingkat perguruan tinggi (S1/S2/S3/D4 dan D1/D2/D3), sedangkan hanya sekitar 1% peserta yang memiliki pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Selain itu, mayoritas peserta survei berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang memiliki pendapatan antara 2-5 juta Rupiah, mencapai 50% dengan median pendapatan sebesar 3 juta Rupiah. Mayoritas peserta survei mengeluarkan sekitar 100-300 ribu rupiah setiap bulannya untuk membayar tagihan listrik, dengan sekitar 43% peserta memiliki median pengeluaran sebesar 200 ribu rupiah. Studi ini juga menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalokasikan sekitar 7% dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik setiap bulannya.

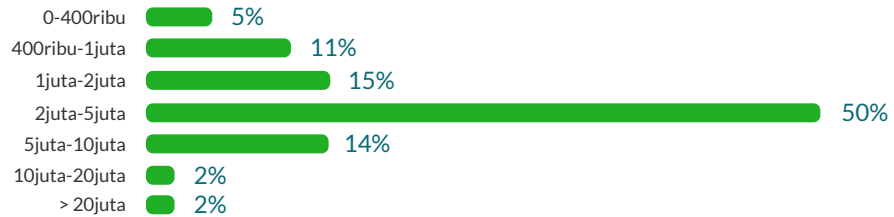
Gambar 2. Jenis Gender



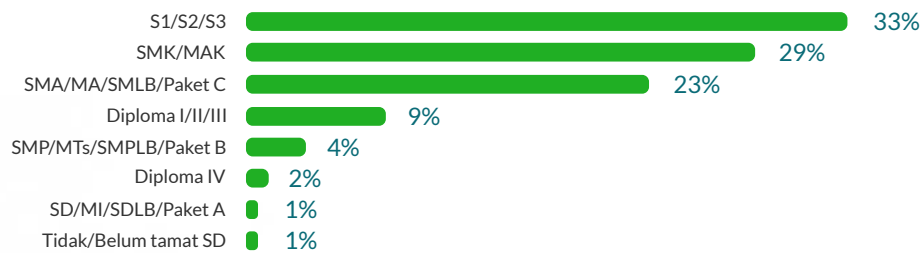
Gambar 3. Status Pekerjaan



Gambar 4. Pendapatan (dalam rupiah)



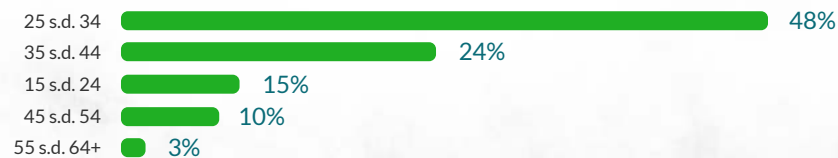
Gambar 5. Pendidikan



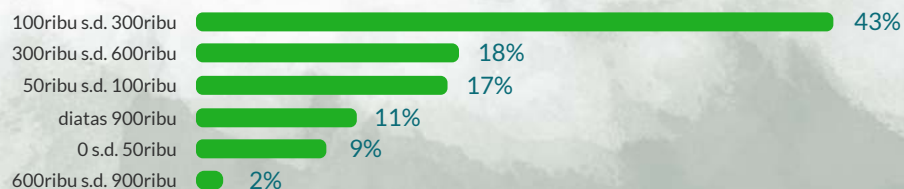
Gambar 6. Kawasan domisili



Gambar 7. Usia



Gambar 8. Pengeluaran Listrik Bulanan (dalam rupiah)



Gambar 9. Persebaran Responden berdasarkan Domisili

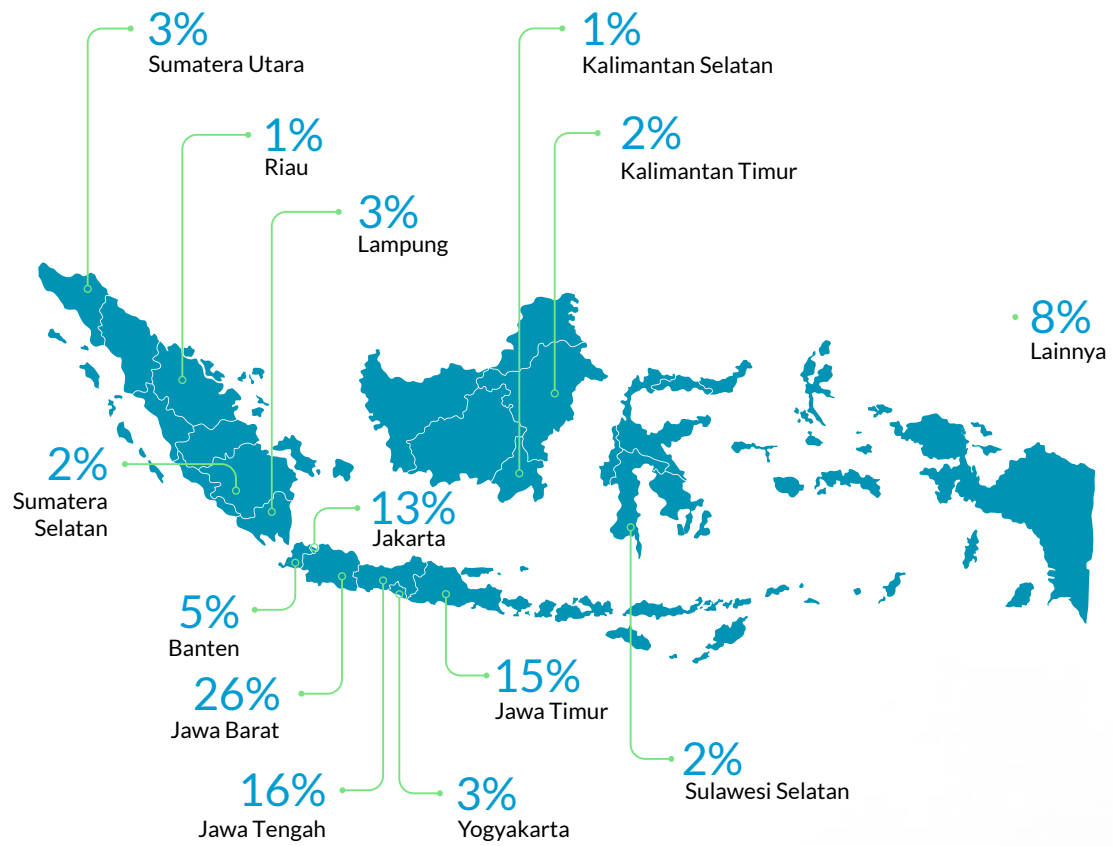




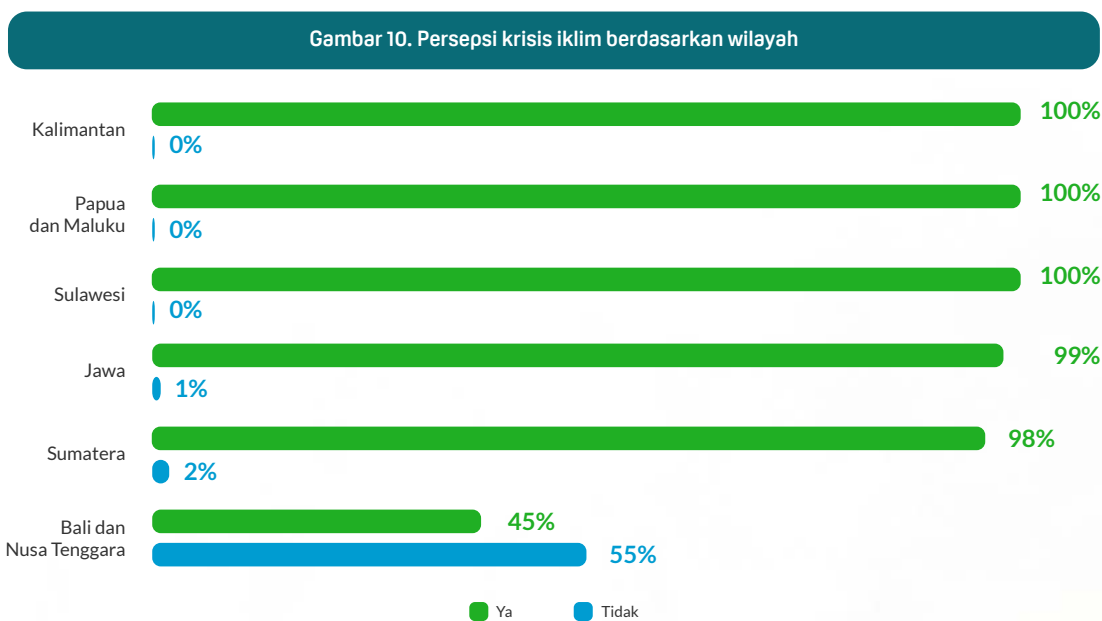
Foto: unsplash.com/navi

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Krisis Iklim Di Indonesia?

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Krisis Iklim Di Indonesia?

Krisis iklim merupakan kondisi yang mengacu pada perubahan ekstrim jangka panjang terkait suhu dan pola cuaca. Krisis iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Fenomena tersebut dinamakan gas rumah kaca yang disebabkan oleh kegiatan manusia melepaskan emisi ke udara, salah satunya bersumber dari pembakaran energi fosil, deforestasi hutan, dan penggunaan lahan. Krisis iklim ini sangat berdampak dalam kehidupan manusia khususnya pada kondisi tempat tinggal, ketersediaan pangan, kesehatan, dan keselamatan hidup.

Krisis iklim dirasakan hampir di semua daerah di Indonesia

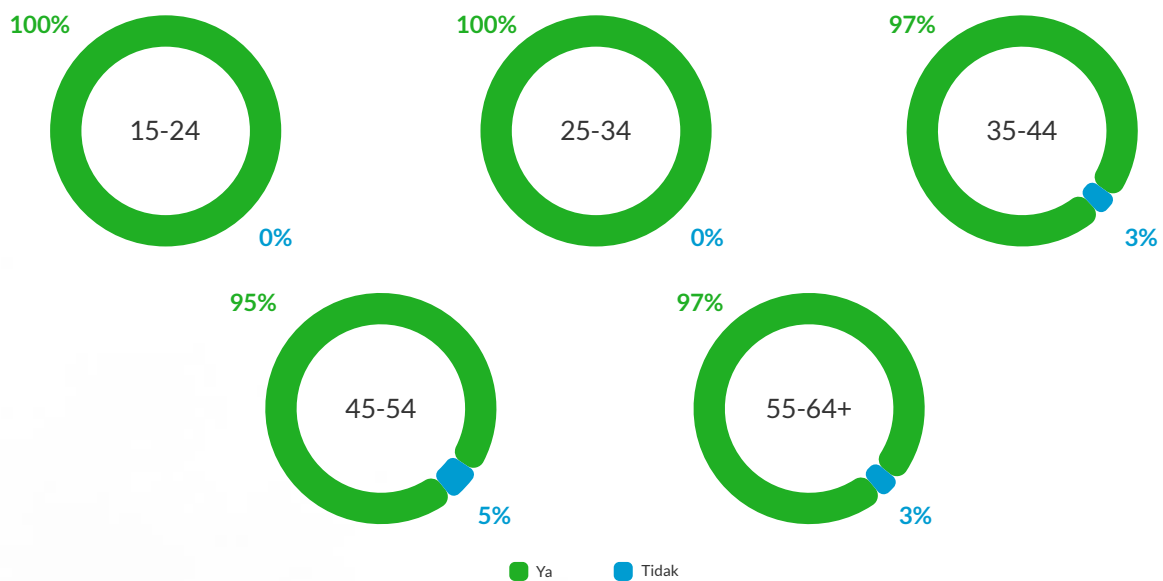


Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Apakah Anda merasa bahwa krisis Opsi jawaban meliputi, “Tidak dan Ya”. Responden ditanyakan domisili mereka. Opsi jawaban meliputi seluruh provinsi di Indonesia sebelum pemekaran Papua Barat menjadi tiga provinsi pada 25 Juli 2022

Studi ini menunjukkan mayoritas masyarakat di Indonesia memiliki persepsi bahwa krisis iklim merupakan hal yang nyata dan tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja. Hampir semua responden yang tinggal di pulau Jawa, Sumatera, Papua, Maluku, dan Sulawesi menyatakan bahwa krisis iklim hal yang nyata. Menariknya, 55% responden yang tinggal di Bali dan Nusa Tenggara merasa bahwa krisis iklim

bukanlah hal yang nyata. Studi lanjutan dibutuhkan untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang fenomena ini. Namun demikian, salah satu kemungkinan mengapa terjadi perbedaan adalah dikarenakan kondisi iklim yang berbeda antara wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan wilayah lainnya karena perbedaan rata-rata anomali suhu antar pulau³.

Gambar 11. Apakah Krisis Iklim Hal yang Nyata? (Persepsi Krisis Iklim berdasarkan Umur)



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, "Apakah Anda merasa bahwa krisis iklim merupakan hal yang nyata?". Opsi jawaban meliputi "Tidak" dan "Iya". Opsi jawab meliputi rentang umur 15-24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun, 55-64+ tahun.

Studi ini menemukan bahwa Generasi Z dan Millennial dengan rentang usia 15-34 tahun paling banyak berpersepsi bahwa krisis iklim adalah hal yang nyata. Di sisi lain, sebanyak 5% responden dari rentang usia 45-54 tahun menjawab tidak. Hasil ini menjelaskan bahwa Generasi muda menganggap di masa depan, mereka akan menghadapi waktu

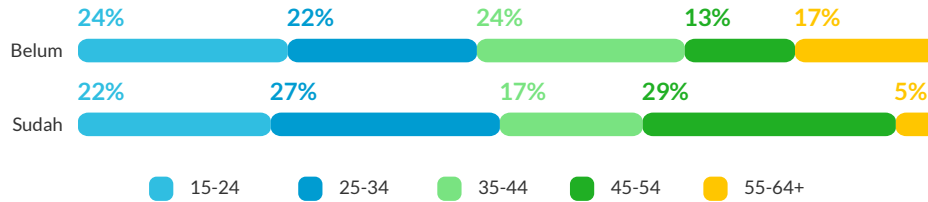
yang lebih panjang dibandingkan dengan rentang usia di atasnya sehingga mayoritas menjawab 'Iya'. Dengan demikian, perubahan demi perubahan cepat atau lambat akan segera dirasakan oleh rentang Generasi di usia tersebut yang berimplikasi pada kesempatan bekerja, dampak bisnis dan retensi pegawai, hingga pergeseran bidang pekerjaan⁴.

³ BMKG. 2023. Ekstrem Perubahan Iklim.

⁴ Deloitte. 2023. 2023 Gen Z and Millennial Survey. 'Over 40% of Gen Z, Millennials Would Switch Jobs Over Climate Concerns: Deloitte Survey'.

1.1 Generasi Muda Lebih Kritis Mengenai Kebijakan Krisis Iklim

Gambar 12. Pengetahuan mengenai Kebijakan Pemerintah terkait Pencegahan Krisis Iklim berdasarkan Umur



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Menurut Anda, apakah pemerintah sudah memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim?”. Opsi jawaban meliputi “Belum” dan “Sudah”. Responden ditanyakan usia mereka. Opsi jawaban meliputi usia dari rentang 18-65+ tahun.

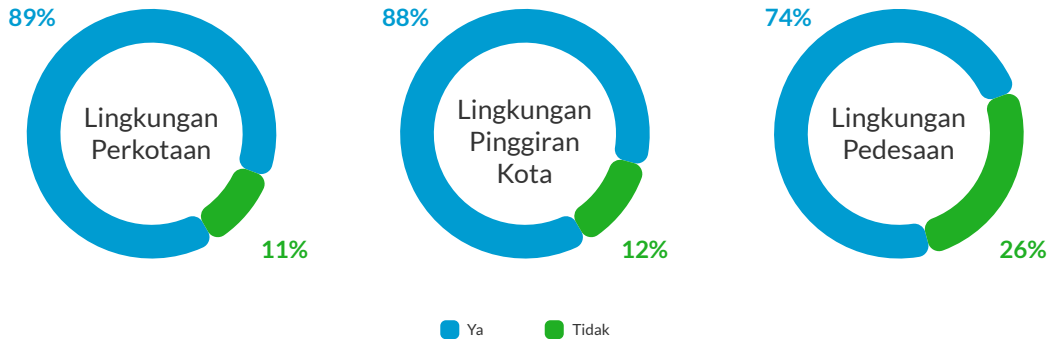
Studi ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara Generasi Z (berusia di bawah 24 tahun) dan Millennial (berusia 25-44 tahun) terkait sikap mereka terhadap kebijakan krisis iklim. Segmen Generasi tersebut dinilai lebih kritis dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebijakan pencegahan krisis iklim. Masyarakat yang menilai pemerintah belum memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim, mayoritas berasal dari Generasi Z sebesar 24% dan Generasi Millennial (46%). Data ini menjelaskan bahwa kemampuan segmen Generasi Z dan Millennial dalam menilai kebijakan secara kritis kemungkinan besar masih dipengaruhi oleh cepatnya arus informasi mengenai isu lingkungan dari berbagai macam platform media sosial dan berita.

Hal itu didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center* bahwa Generasi Z dan Millennial memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan isu lingkungan di media sosial⁵. Tidak jarang Generasi Z dan Millennial turut serta aksi melawan krisis iklim lewat platform media sosial. Hal yang sama mungkin saja terjadi di Indonesia, Generasi Z dan Millennial di Indonesia lebih mudah terpapar isu mengenai krisis iklim melalui berbagai kanal informasi, sehingga mereka lebih kritis dengan kebijakan krisis iklim. Data dari studi ini menunjukkan besarnya potensi yang dapat ditingkatkan untuk mengawal kebijakan maupun program transisi energi, termasuk salah satunya JETP (*Just Energy Transition Partnership*) atau Transisi Energi Berkeadilan.

⁵ Pew Research Center. (2021). Gen Z, Millennials Stand Out for Climate Change Activism, Social Media Engagement With Issue.

1.2 Perlunya Deklarasi Darurat Iklim di Indonesia

Gambar 13. Urgensi Deklarasi berdasarkan Karakteristik Daerah



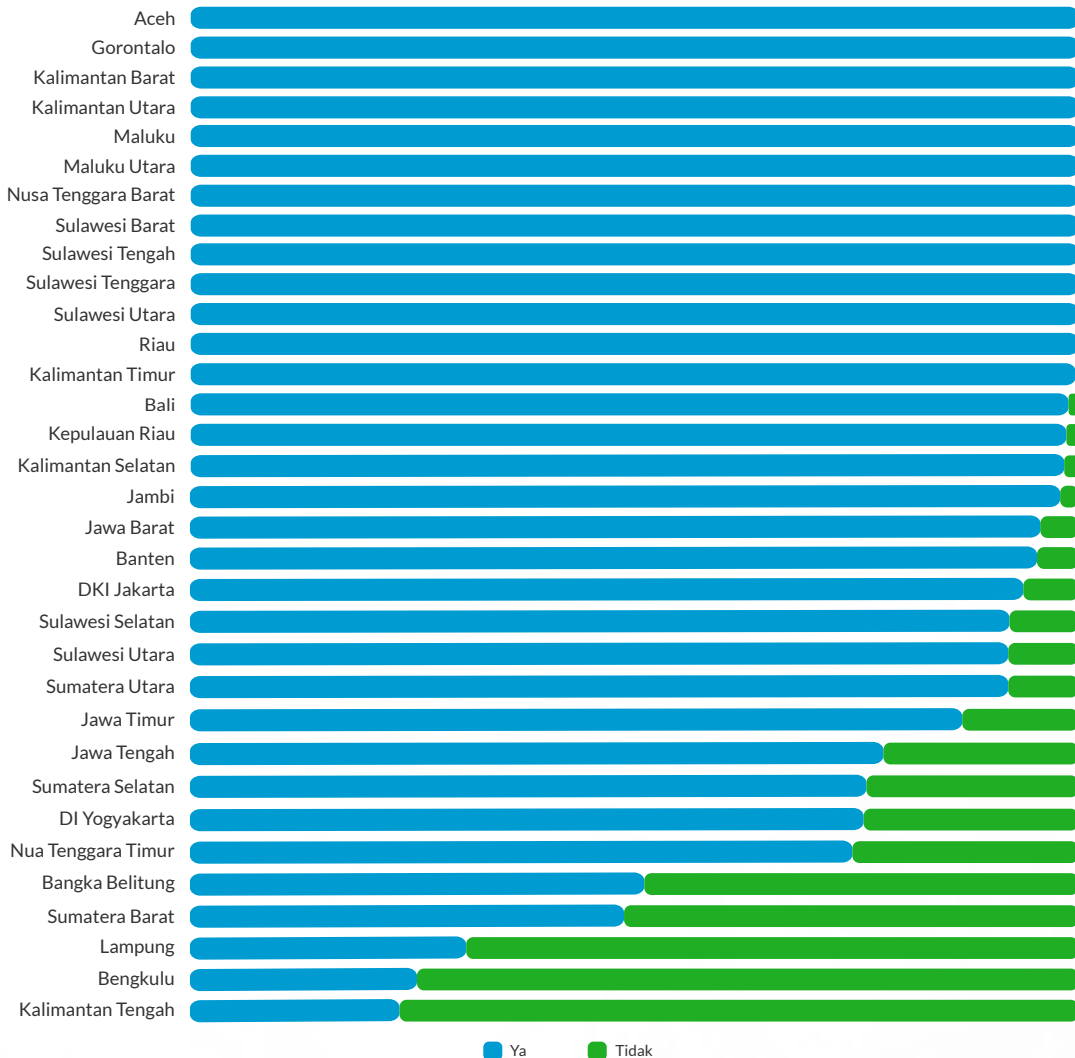
Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, "Apakah Pemerintah Indonesia saat ini perlu mendeklarasikan kondisi darurat iklim?". Opsi jawaban meliputi "Tidak" dan "Iya". Responden juga diminta untuk memilih klasifikasi lingkungan dimana mereka tinggal. Opsi jawaban meliputi, "Perdesaan, Perkotaan, atau Pinggiran Kota."

Secara umum, 81% masyarakat Indonesia setuju bahwa pemerintah perlu mendeklarasikan kondisi darurat iklim. Jika dilihat dari daerah tempat tinggalnya, masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan (89%) dan pinggiran kota (88%) cenderung lebih setuju jika pemerintah mendeklarasikan kondisi darurat iklim dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan (74%). Sejumlah 26% masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan masih belum merasa perlu untuk menjadikan isu krisis iklim sebagai prioritas pemerintah. Pernyataan darurat iklim juga

mengindikasikan perlunya respon cepat pemerintah, dan perangkat kebijakan yang dibutuhkan untuk mencegah krisis iklim semakin parah. Hal ini menunjukkan bahwa isu krisis iklim lebih bergulir pada konteks daerah perkotaan dan pinggiran kota daripada di daerah pedesaan. Jika dilihat dari kondisi saat ini, masyarakat perkotaan dan pinggiran kota lebih mudah menjangkau dan mendapatkan akses paparan informasi mengenai perubahan iklim karena banyak dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.

1.3 Mayoritas masyarakat di luar pulau Jawa menginginkan penanganan krisis iklim yang lebih serius

Gambar 14. Urgensi Deklarasi Darurat Iklim berdasarkan Provinsi



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Apakah Pemerintah Indonesia saat ini perlu mendeklarasikan kondisi darurat iklim?”. Opsi jawaban meliputi “Tidak ” dan “ Iya”. Responden ditanyakan domisili mereka. Opsi jawaban meliputi seluruh provinsi di Indonesia sebelum pemekaran Papua Barat menjadi tiga provinsi pada 25 Juli 2022

Persepsi mengenai darurat iklim sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan yang dihadapi masyarakat. Semakin sering seseorang menghadapi ancaman kerusakan ekosistem atau gejala ekstrem dari perubahan iklim, maka mereka akan cenderung memiliki perspektif darurat iklim. Oleh karena itu

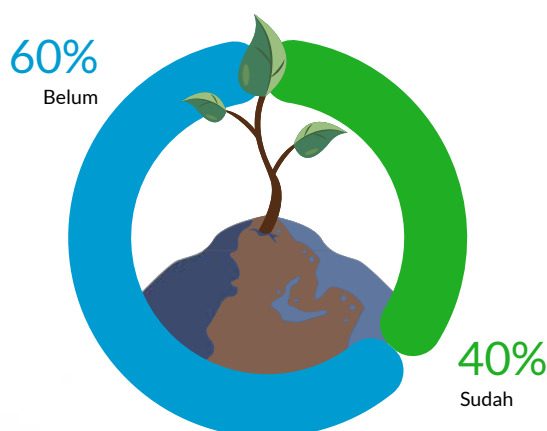
wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku cenderung menyetujui perlunya penanganan krisis iklim yang lebih serius. Sebagian besar responden yang mendesak keseriusan langkah pemerintah berada di wilayah penghasil tambang, smelter, dan industri ekstraktif.

Masyarakat menganggap pemerintah belum memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim

Studi ini menunjukkan mayoritas masyarakat di Indonesia memiliki persepsi bahwa krisis iklim merupakan hal yang nyata dan tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja. Hampir semua responden yang tinggal di pulau Jawa, Sumatera, Papua, Maluku, dan Sulawesi menyatakan bahwa krisis iklim hal yang nyata. Menariknya, 55% responden yang tinggal di Bali dan Nusa Tenggara merasa bahwa krisis iklim

bukanlah hal yang nyata. Studi lanjutan dibutuhkan untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang fenomena ini. Namun demikian, salah satu kemungkinan mengapa terjadi perbedaan adalah dikarenakan kondisi iklim yang berbeda antara wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan wilayah lainnya karena perbedaan rata-rata anomali suhu antar pulau.

Gambar 15. Pengetahuan Masyarakat mengenai Keberadaan Kebijakan Krisis Iklim di Indonesia



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, "Menurut Anda, apakah pemerintah sudah memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim?". Opsi jawaban meliputi "Belum" dan "Sudah".

Berdasarkan hasil survei ini bahwa sebanyak 60% masyarakat menilai pemerintah belum mampu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah krisis iklim di Indonesia. Menanggapi hasil survei tersebut, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia sebenarnya telah meratifikasi *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change*⁶, dan mengeluarkan regulasi terkait pembentukan pasar karbon dan pajak karbon melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang mengatur skema *carbon pricing (carbon trading dan carbon offset)*, pembayaran berbasis kinerja (*result-based payment/RBP*), pungutan atas karbon seperti pajak karbon dan PNBK, serta mekanisme lainnya.

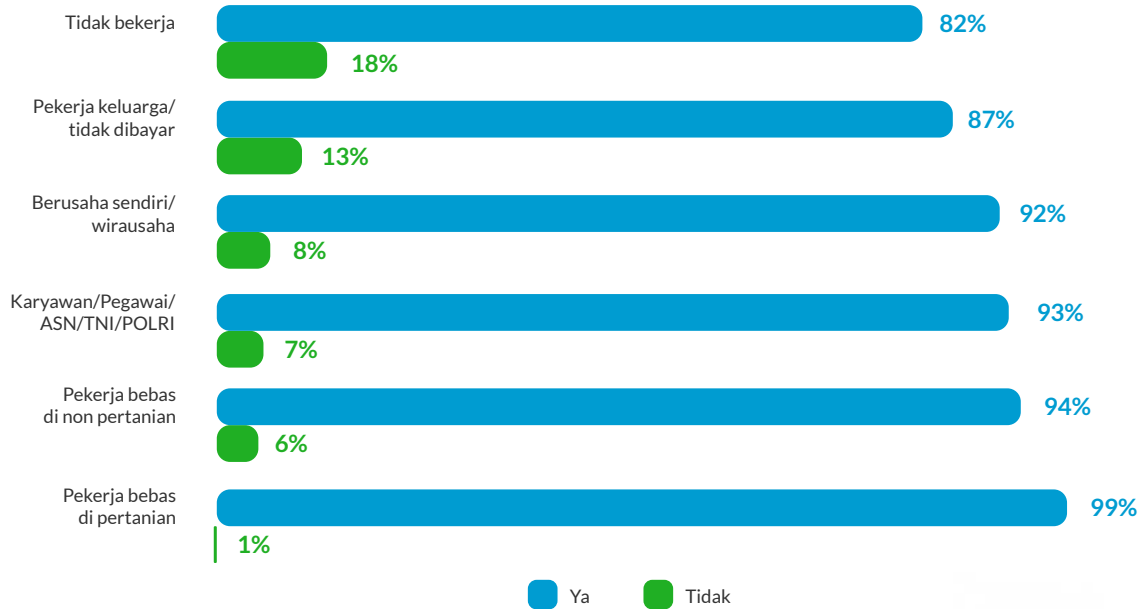
Selanjutnya, pengaturan terkait pajak karbon sendiri diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun sejumlah regulasi telah disahkan, pemerintah nyatanya juga masih terlihat longgar terhadap penggunaan batu bara sebagai sumber energi listrik nasional. Hasil laporan Project Multatuli menemukan terdapat koneksi politik dan bisnis diantara elit politik dengan oligarki batubara terbesar di Indonesia⁷. Pejabat baik di rumpun eksekutif maupun legislatif masih terasosiasi dengan perusahaan batubara sehingga masyarakat masih khawatir dengan penegakan aturan terkait krisis iklim yang sudah disahkan.

⁶ Kementerian KLHK. (2016). SIARAN PERS Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim.

⁷ Project Multatuli. (2022). Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi.

1.4 Masyarakat Rentan Lebih Pesimis dengan Kapasitas Pemerintah Melakukan Transisi Energi

Gambar 16. Persepsi Masyarakat terhadap Kapasitas Pemerintah Melakukan Transisi Energi berdasarkan Status Pekerjaan



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Menurut Anda, Apakah pemerintah memiliki kapasitas untuk melakukan transisi energi?”. Opsi jawaban meliputi “Tidak” dan “Ya”. Responden ditanyakan pekerjaan mereka. Opsi jawaban meliputi, “Berusaha sendiri/wirusaha, Karyawan/Pegawai/ASN/TNI/POLRI, Pekerja bebas di non pertanian, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja keluarga/tidak dibayar, dan Tidak Bekerja.”

Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat rentan menjadi kelompok masyarakat yang paling pesimis dengan kapasitas pemerintah dalam melakukan transisi energi. Sedangkan, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja bebas menjadi kelompok masyarakat yang paling optimis dengan kapasitas pemerintah melakukan transisi energi. Hanya 1% dari masyarakat yang bekerja sebagai pekerja bebas di pertanian menyatakan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan transisi energi.

Masyarakat yang tidak bekerja dan pekerja keluarga/tidak dibayar cenderung tidak memiliki urgensi dengan isu transisi energi, karena jika dilihat dari teori hirarki kebutuhan, kemungkinan kalangan kelompok ini masih berusaha memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) daripada memikirkan isu transisi energi. Di sisi lain, data ini juga dapat mengindikasikan bahwa kapasitas pemerintah yang diartikulasikan sebagai kebijakan, program, atau proyek terkait transisi energi belum dirasakan oleh masyarakat di akar rumput karena sejauh ini yang ramai diperbincangkan publik hanya seputar pajak emisi karbon dan subsidi mobil listrik yang lebih menysar masyarakat ekonomi menengah ke atas.



Foto: unsplash.com/rendy novantino

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Keberpihakan Calon Presiden Pada Pemilu 2024 Mengenai Penyelesaian Krisis Iklim?

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Keberpihakan Calon Presiden Pada Pemilu 2024 Mengenai Penyelesaian Krisis Iklim?

Isu krisis iklim terutama mengenai transisi energi kemungkinan akan menjadi salah satu isu sentral dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Wacana mengenai transisi energi akhir-akhir ini mulai dimunculkan oleh koalisi oposisi dengan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah/pertahana. Hal ini muncul karena isu energi sangat erat kaitannya dengan krisis iklim dan sejak lama sebenarnya telah menjadi salah satu isu populis, yang mana seluruh lapisan masyarakat sadar atau tidak sadar memiliki kepentingan dengan isu energi. Hal ini kemudian akan meningkatkan peluang isu transisi energi dan krisis iklim menjadi topik sentral dalam kontestasi pemilu tahun 2024.



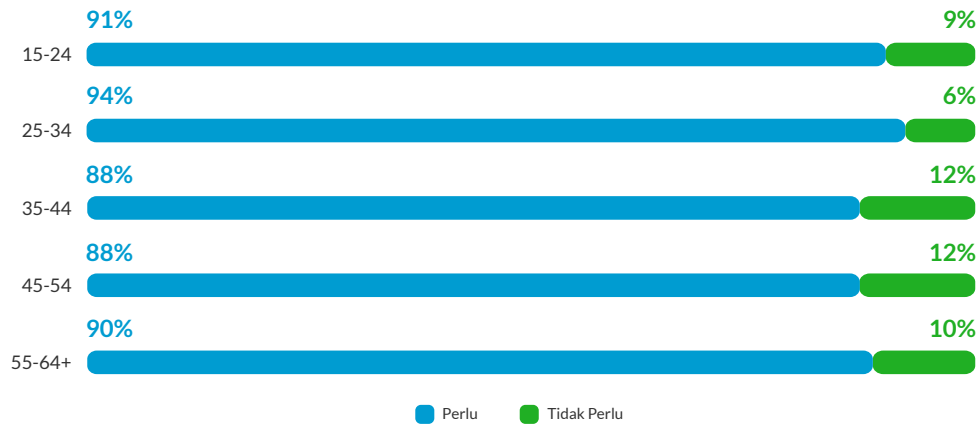
Selain itu, para peserta pemilu tahun 2024 mendatang juga perlu terus mengawal isu lingkungan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena dari hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia, ditemukan fakta bahwa pada segmen Generasi muda Millennial (82%) dan Generasi Z

(79%) cenderung peduli dengan isu lingkungan⁸. Dikarenakan Generasi Millennial dan Z pada tahun 2024 sudah memiliki hak pilih, maka kondisi ini berkemungkinan besar akan mempengaruhi arah kampanye pada pemilu tahun 2024 ke depannya.

⁸ VOA Indonesia. (2021). Survei Indikator: Generasi Z dan Millennial Semakin Peduli Isu Iklim.

2.1 Masyarakat Ingin Tahu Gagasan mengenai Krisis Iklim dari Calon Presiden

Gambar 17. Urgensi Topik Krisis Iklim dalam Debat Calon Presiden berdasarkan Usia



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, "Menurut Anda, apakah topik terkait krisis iklim perlu dimasukkan pada saat debat Calon Presiden (Capres)?". Opsi jawaban meliputi "Perlu" dan "Tidak Perlu". Responden ditanyakan usia mereka. Opsi jawaban meliputi usia dari rentang 18-65+ tahun.

Gambar 18. Urgensi Topik Krisis Iklim dalam Debat Calon Presiden berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, "Menurut Anda, apakah topik terkait krisis iklim perlu dimasukkan pada saat debat Calon Presiden (Capres)?". Opsi jawaban meliputi "Perlu" dan "Tidak Perlu". Responden ditanyakan tingkat pendidikan mereka. Opsi jawaban meliputi, "Tidak/belum tamat SD, SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMK/MAK, SMA/MA/SMLB/Paket C, Diploma I/II/III, Diploma IV, dan S1/S2/S3.

Jika dilihat dari profil usia, Generasi Z (usia 15-24) dan Millennial muda (usia 25-34) memiliki harapan yang lebih tinggi untuk memasukkan isu krisis iklim dalam debat Capres tahun 2024. Hal ini sesuai dengan data sebelumnya yang menyatakan bahwa Generasi tersebut memiliki kepedulian yang lebih mengenai isu krisis iklim dan lingkungan. Selain itu,

Generasi tersebut memiliki kekhawatiran karena yang akan menjadi korban dari perubahan iklim kedepannya adalah Generasi muda. Kemudian, jika dilihat dari profil latar belakang pendidikan, secara konstan segmen masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kepedulian tertinggi mengenai topik krisis iklim di debat capres.

2.2 Anies Baswedan Menjadi Kandidat Calon Presiden Paling Banyak Membicarakan Isu Lingkungan

Gambar 19. Tiga Calon Presiden Teratas Bicara Isu Lingkungan



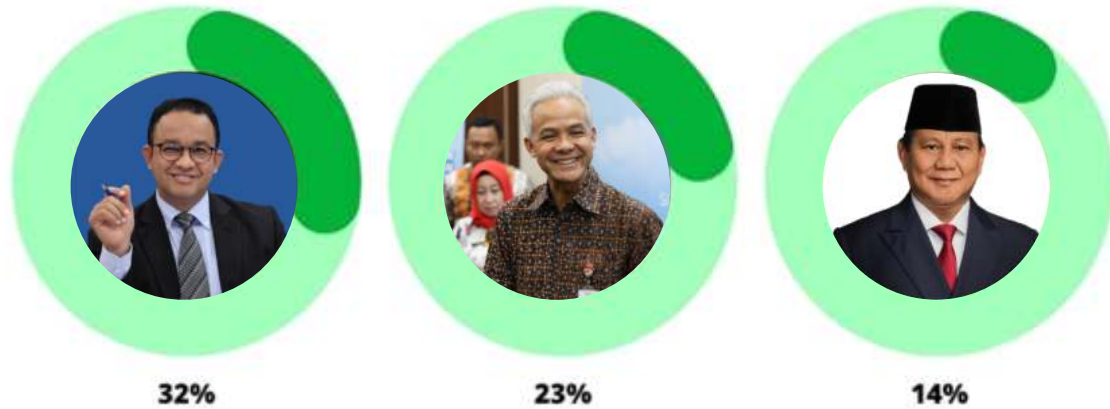
Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Jika anda menjawab sudah pernah mendengar Calon presiden tertentu menyuarakan isu lingkungan, sebutkan nama capresnya?”. Pertanyaan bersifat terbuka, tidak tersedia pilihan jawaban.

Studi ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan dianggap paling banyak berbicara mengenai isu lingkungan dengan persentase 31%, yang diikuti oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang masing-masing memiliki persentase 25% dan 23%. Hal ini wajar mengingat ketiga nama tersebut adalah bakal calon presiden (bacapres) yang sudah

dideklarasikan oleh koalisi partainya masing-masing sehingga mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Anies Baswedan menjadi “*top of mind*” di tengah masyarakat untuk calon presiden yang menyuarakan isu lingkungan dibandingkan Prabowo dan Ganjar.

2.3 Anies Baswedan Menjadi Calon Presiden Paling Peka terhadap Isu Lingkungan

Gambar 20. Tiga Calon Presiden Paling Peka terhadap Isu Lingkungan



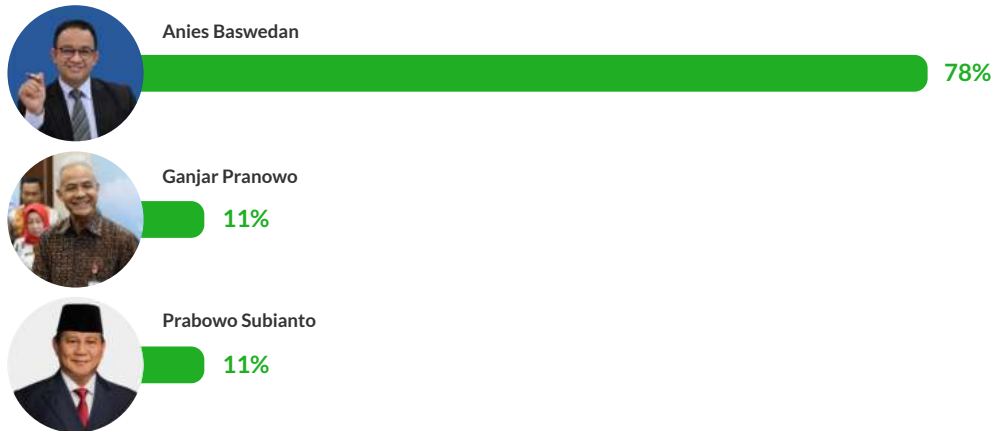
Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, "Menurut Anda, siapakah kandidat Calon Presiden (Capres) berikut ini yang memiliki kepedulian tertinggi pada isu lingkungan?". Opsi jawaban meliputi "Airlangga Hartarto", "Anies Baswedan", "Erick Thohir", "Ganjar Pranowo", "Muhaimin Iskandar", "Prabowo Subianto", "Ridwan Kamil", dan "Sandiaga Uno"

Studi ini menunjukkan Anies Baswedan menjadi calon presiden yang paling banyak dinilai masyarakat memiliki kepekaan terhadap isu lingkungan diikuti Ganjar Pranowo (23%) dan Prabowo Subianto (14%). Posisi Anies Baswedan saat ini merupakan oposisi dari pemerintah sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pro pemerintah. Posisi tersebut membuat Anies Baswedan banyak mengkritik kebijakan pemerintah terhadap penanganan polusi udara dan perubahan

iklim. Dari berbagai media massa Anies Baswedan mempromosikan kinerjanya selama menjadi Gubernur Jakarta dengan mengklaim kebijakan ganjil-genap, membebaskan pajak mobil listrik, dan sistem transportasi terintegrasi berhasil mengurangi polusi udara di Jakarta. Selain itu, dalam berbagai kesempatan kampanye Anies Baswedan keras mengkritik kebijakan subsidi mobil listrik yang tidak efektif dan tidak berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.

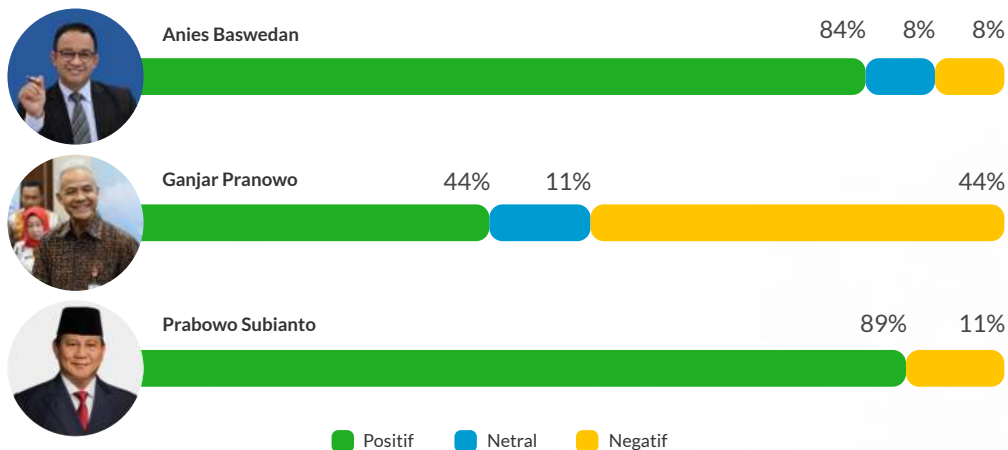
2.4 Posisi calon presiden di tengah isu lingkungan

Gambar 21. Jumlah Berita Bertopik Lingkungan yang bertautan dengan Calon Presiden



Sumber data: diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan dan dikelompokkan berdasarkan 3 nama calon presiden yang tertaut dalam berita.

Gambar 22. Sentimen Berita Lingkungan yang Diusung Calon Presiden



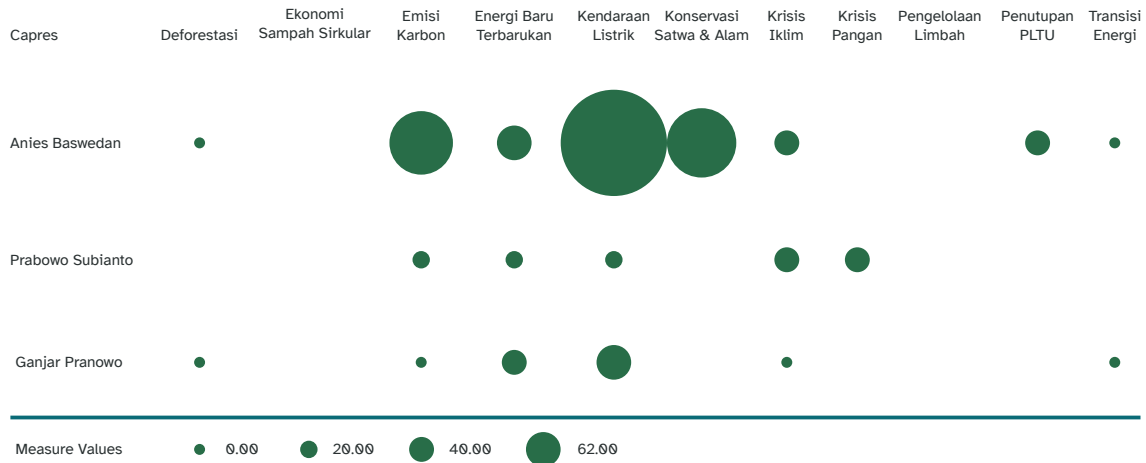
Sumber data: diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan dan dikelompokkan berdasarkan 3 nama calon presiden yang tertaut dalam berita. Pengolahan data yang dilakukan berupa klasifikasi sentimen dengan metode leksikon VADER (*Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner*).

Temuan hasil studi lainnya menangkap sentimen berita dari masing-masing tokoh tersebut diantaranya, Anies memperoleh sentimen positif sebesar 84%, Ganjar 44%, dan Prabowo 89%. Selanjutnya, sentimen negatif yang diperoleh Anies

sebesar 8%, Ganjar 44%, dan Prabowo 11%. Pendekatan sentimen bertujuan untuk melihat respon mengenai persepsi pemberitaan yang dilakukan media kepada ketiga calon presiden tersebut terhadap isu-isu lingkungan.

2.5 Frekuensi Topik Berita Lingkungan yang Ditautkan pada Capres

Gambar 23. Frekuensi Topik Berita Lingkungan yang Diusung Calon Presiden



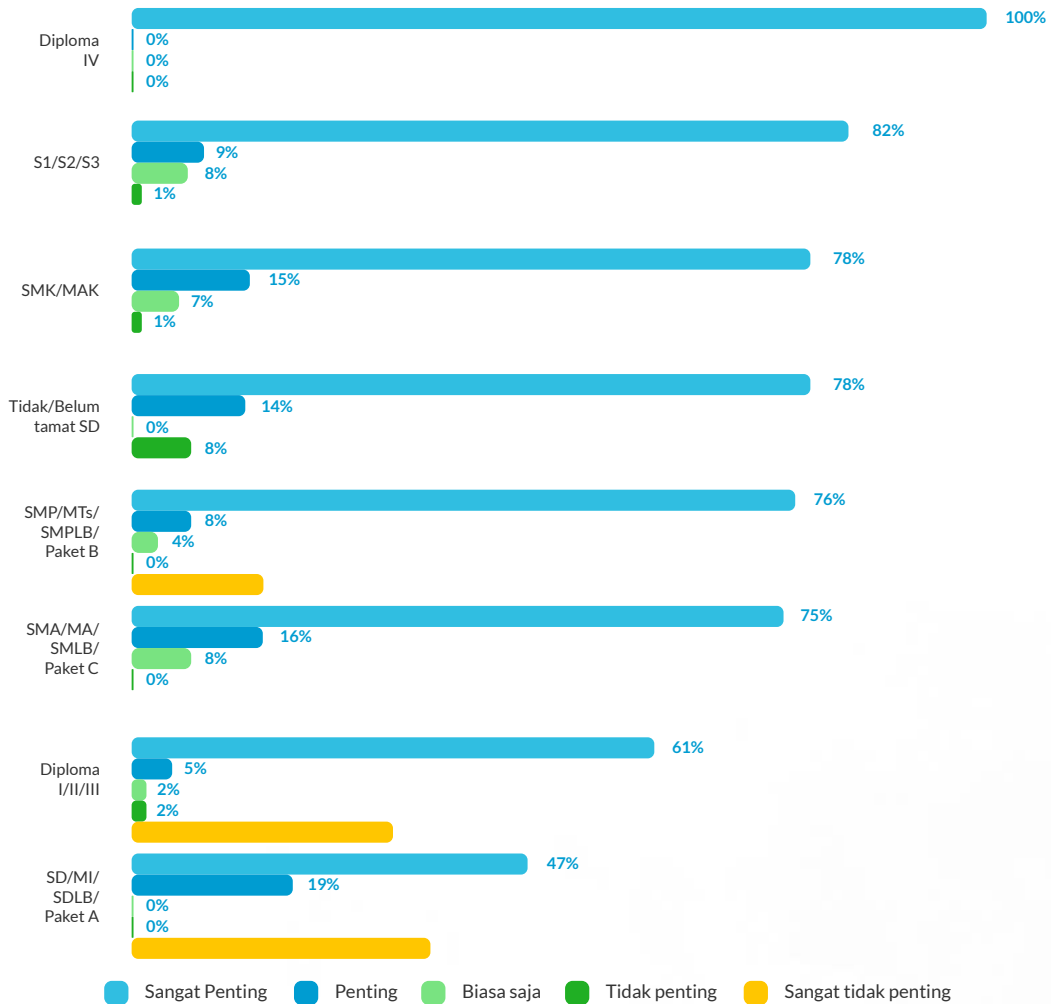
Sumber : diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan dan dikelompokkan berdasarkan tautan nama calon presiden

Di tengah tahun politik semua calon presiden telah mulai menyampaikan gagasan ke publik terkait masalah publik dan keberpihakannya. Salah satu masalah publik yang dihadapi negara saat ini adalah degradasi lingkungan hidup akibat perubahan iklim. Dari pemilu sebelum-sebelumnya, isu lingkungan sangat sedikit disinggung oleh calon presiden karena tidak dianggap signifikan dalam mendorong elektabilitas. Saat ini, di tengah dorongan global dan ancaman krisis energi di Indonesia, calon presiden dipaksa untuk mengambil sikap dan menyampaikan gagasannya mengenai langkah strategis mengatasi krisis iklim dan lingkungan. Studi ini menunjukkan Anies Baswedan menjadi calon Presiden yang paling banyak menyinggung isu lingkungan sekaligus menjadi Calon Presiden yang paling banyak menyampaikan gagasan mengenai kendaraan listrik dan emisi karbon.



2.6 Mayoritas Perilaku Pemilih Sangat Rasional terhadap Isu Lingkungan

Gambar 24. Urgensi Capres dan Cawapres Memiliki *Track Record* di Bidang Perlindungan Lingkungan

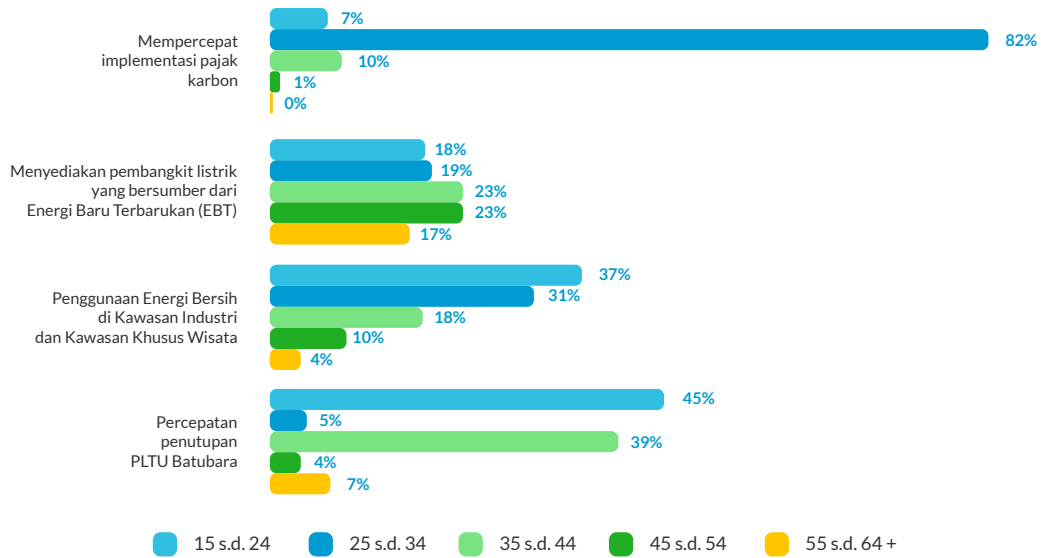


Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Menurut Anda, seberapa penting Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) memiliki track record di bidang perlindungan lingkungan hidup?”. Opsi jawaban meliputi “Sangat Tidak Penting”, “Tidak Penting”, “Biasa saja”, “Penting”, “Sangat Penting”. Responden ditanyakan tingkat pendidikan mereka. Opsi jawaban meliputi, “Tidak/belum tamat SD, SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMK/MAK, SMA/MA/SMLB/Paket C, Diploma I/II/III, Diploma IV, dan S1/S2/S3.

Secara umum pemilih yang rasional terhadap isu lingkungan tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dari tingkat pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi merasa perlu untuk melihat rekam jejak calon presiden terhadap keberpihakannya pada perlindungan lingkungan hidup. Perilaku

pemilih dengan melihat latar belakang dan rekam jejak calon presiden tergolong ke dalam kelompok pemilih rasional dengan cara pandang retrospektif. Data ini memperkuat posisi lingkungan hidup di tengah kontestasi pemilu sebagai salah satu *selective criteria* bagi pemilih untuk menentukan pilihan.

Gambar 25. Keberpihakan Masyarakat terhadap Kebijakan Transisi Energi berdasarkan Usia



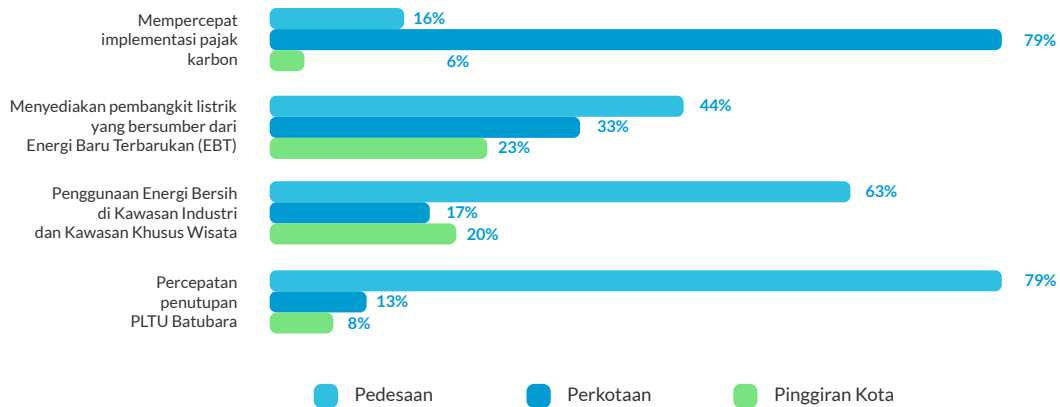
Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Kebijakan transisi energi apa yang seharusnya di usung Capres pada Pemilu 2024?”. Opsi jawaban meliputi “Mempercepat implementasi pajak karbon”, “Mendorong nuklir”, Menyediakan pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), “Penggunaan Energi Bersih di kawasan industri dan Kawasan Khusus Wisata”, “Percepatan penutupan PLTU batubara”. Responden juga ditanyakan usia mereka. Opsi jawaban meliputi usia dari rentang 18-65+ tahun.

Sementara itu, jika dilihat dari segmentasi umur, Generasi Z (15-24 tahun) lebih banyak mendukung percepatan penutupan PLTU batubara, diikuti dengan penggunaan energi bersih di kawasan industri dan kawasan khusus wisata. Menariknya, Generasi Millennial paling banyak memilih opsi percepatan implementasi pajak karbon. Hal ini dikarenakan Pajak karbon memiliki daya tarik praktis karena memberikan kepastian atas harga emisi di masa depan, membantu mendorong investasi hijau dan konservasi energi⁹.



⁹ IMF. 2022. More Countries Are Pricing Carbon, but Emissions Are Still Too Cheap.

Gambar 26. Keberpihakan Masyarakat terhadap Kebijakan Transisi Energi berdasarkan Karakteristik Daerah

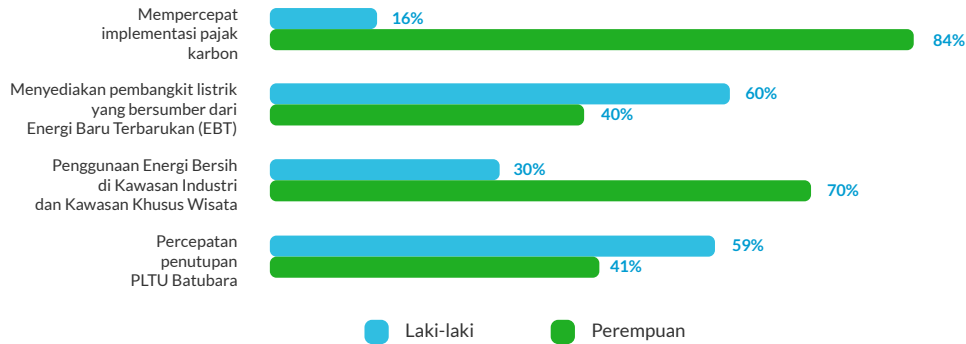


Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Kebijakan transisi energi apa yang seharusnya di usung Capres pada Pemilu 2024?”. Opsi jawaban meliputi “Mempercepat implementasi pajak karbon”, “Mendorong nuklir”, “Menyediakan pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)”, “Penggunaan Energi Bersih di kawasan industri dan Kawasan Khusus Wisata”, “Percepatan penutupan PLTU batubara”. Responden juga ditanyakan karakter daerah domisili mereka. Opsi jawaban meliputi “Perdesaan”, “Perkotaan”, dan “Pinggiran Kota”.

Sementara itu, dilihat dari profil tempat tinggal, masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan lebih memiliki preferensi terhadap solusi implementasi pajak karbon dibandingkan dengan segmen masyarakat lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi masyarakat kota yang relatif paling terpengaruh oleh polusi udara. Rasionalisasi yang sama dapat digunakan untuk preferensi masyarakat desa terhadap penggunaan energi bersih di kawasan industri dan wisata serta penutupan PLTU batubara. Karena pada kenyataannya, mayoritas PLTU batubara terletak di pedesaan seperti PLTU Cirebon, PLTU Paiton, dan PLTU Batang sehingga dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat desa.



Gambar 27. Keberpihakan Masyarakat terhadap Kebijakan Transisi Energi berdasarkan Gender



Sumber: Penulis. N = 1.245. Responden ditanyakan, “Kebijakan transisi energi apa yang seharusnya di usung Capres pada Pemilu 2024?”. Opsi jawaban meliputi “Mempercepat implementasi pajak karbon”, “Mendorong nuklir”, Menyediakan pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), “Penggunaan Energi Bersih di kawasan industri dan Kawasan Khusus Wisata”, “Percepatan penutupan PLTU batubara”. Responden juga ditanyakan jenis kelamin mereka. Opsi jawaban berupa laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dari profil usia responden, opsi pembangkit listrik EBT terlihat memiliki korelasi yang positif dengan semakin tingginya usia responden, sedangkan opsi penggunaan energi bersih di kawasan industri dan khusus wisata terlihat memiliki korelasi negatif dengan semakin tingginya usia. Selanjutnya, jika dilihat dari profil jenis kelamin pun terdapat preferensi solusi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih memiliki preferensi solusi kebijakan relatif berada di hulu, konservatif, dan sederhana seperti halnya pajak karbon (84%) dan penggunaan energi bersih di kawasan industri dan khusus wisata (70%). Sedangkan laki-laki memiliki preferensi solusi yang lebih tegas seperti percepatan penutupan PLTU batubara (59%), dan menyediakan pembangkit listrik EBT (60%).





Foto: unsplash.com/julia.lopptien

Bagaimana Peran Media Massa dalam Mengangkat Isu Lingkungan di Indonesia?

Bagaimana Peran Media Massa dalam Mengangkat Isu Lingkungan di Indonesia?

Perkembangan teknologi saat ini membuat orang terhubung karena kemudahan akses berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi dan membangun jejaring. Jejaring sosial dapat merujuk pada makna hubungan yang diperoleh dengan menghubungkan antara individu dengan keluarga, tetangga, lingkungan, komunitas, dan aktor lainnya¹⁰. Tiap individu di dalam jaringan sosial dapat memiliki peran ganda yaitu bisa sebagai pusat informasi, perantara, sekaligus penerima dalam pertukaran informasi. Pendekatan analisis jejaring sosial ini telah banyak dilakukan pada lintas disiplin ilmu karena kemampuannya dalam memecahkan sesuatu.

Penerapan Analisis Jejaring Sosial Pada Banyak Disiplin Ilmu



Sosiologi

- Mempelajari pola, hubungan, komunikasi, dan pengaruh dalam kelompok, komunitas, organisasi.
- Memahami dinamika pergerakan sosial.
- Mengidentifikasi individu atau aktor kunci dalam jaringan.



Komunikasi

- Mempelajari pola hubungan dan komunikasi dalam sebuah jaringan sosial secara langsung maupun daring.
- Memahami bagaimana informasi disebarkan dalam sebuah jaringan.



Sosial-Politik, Keamanan, dan Intelijen

- Mempelajari pola hubungan, pengaruh dan komunikasi dalam jaringan politik, kriminal atau teroris.
- Mengidentifikasi individu atau kelompok kunci yang paling berpengaruh dalam kampanye politik, koalisi, diseminasi kebijakan, dan hal lainnya.

¹⁰ Kurniawan, A. & Nugroho, A. (2020). Analisis Jejaring Sosial Tokoh Publik Menggunakan Metode Graphml. Jurnal Sistem Informasi (E-Journal), 123-128, 12(1)

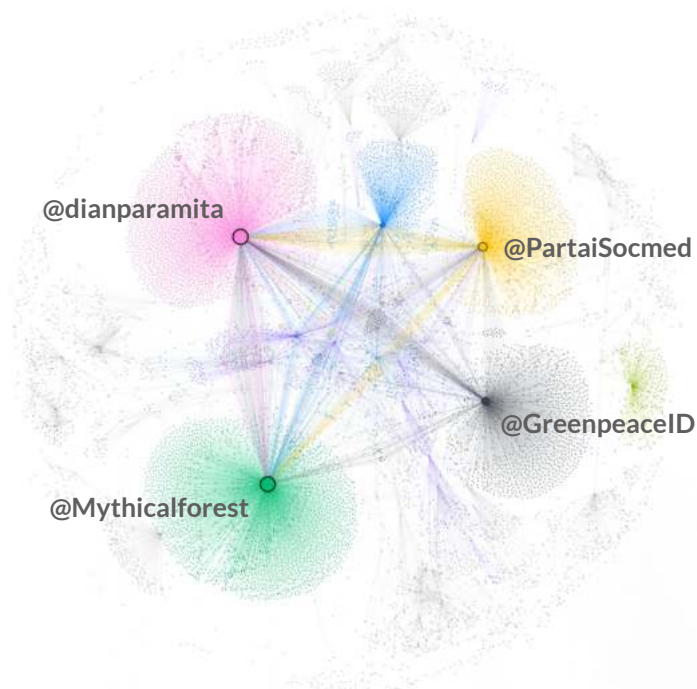
Dari olah data yang dilakukan, terdapat setidaknya tiga tangkapan hasil analisis utama mengenai fenomena jejaring aktor pada isu transisi energi, diantaranya:

a. Aktor Sentral

Studi ini berhasil menjangkit sebanyak 16.166 aktor (akun pengguna) dengan memanfaatkan fitur retweet untuk saling menghubungkan antar aktor.

Terdapat setidaknya empat aktor sentral yang paling berpengaruh dalam menyebarkan informasi isu transisi energi, krisis iklim, dan JETP.

Gambar 28. Visualisasi Aktor Sentral Berdasarkan Komunitas



Sumber: Social Network Analysis diolah oleh penulis. Data diambil dari Twitter

Aktor @dianparamita, @Mythicalforest, @PartaiSocmed, dan @GreenpaceID, memperoleh bobot sentralitas yang paling besar dibandingkan aktor lainnya. @dianparamita terhubung dengan 2.721 aktor, @Mythicalforest dengan 2.623 aktor, @PartaiSocmed dengan 1.499 aktor, dan @GreenpeaceID dengan 1.192 aktor.

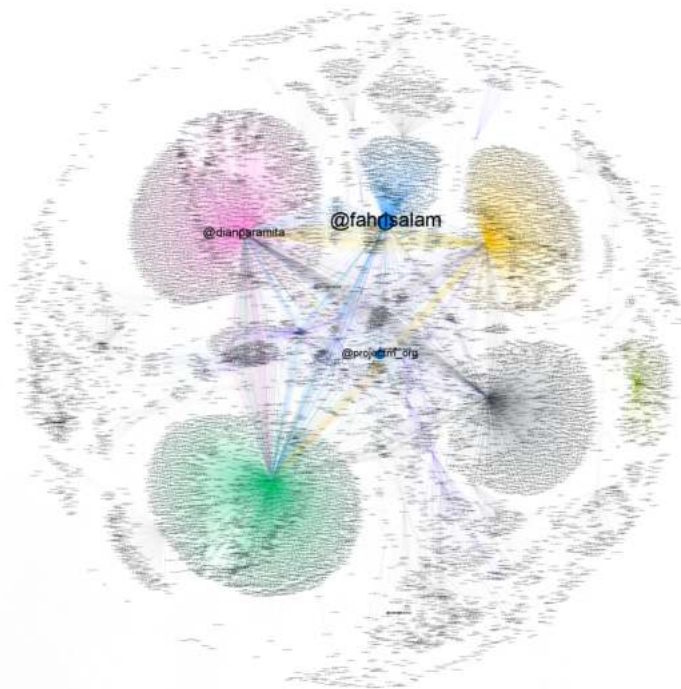
Jumlah aktor yang terhubung dengan ke empat aktor tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam membagikan informasi. Dapat ditelusuri bahwa ke empat aktor tersebut merupakan aktivis penggerak isu sosial dan lingkungan, yang kerap kali menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak publik.

b. Aktor Perantara

Studi ini mendapati aktor perantara yang terlibat dalam jejaring isu transisi energi. Aktor perantara dapat diartikan sebagai aktor (akun pengguna) yang berperan untuk mentransmisi pesan kepada aktor lainnya sehingga mereka dapat dikatakan sebagai

gerbang (jembatan atau penghubung) keluar dan masuknya informasi baru. Sering kali aktor dengan peran ini berada di antara dua atau lebih kluster yang terbentuk untuk membuka dan/atau menutup gerbang pesan secara dua arah.

Gambar 29. Visualisasi Aktor Perantara Berdasarkan Komunitas



Sumber: Social Network Analysis diolah oleh penulis. Data diambil dari Twitter

Pada visualisasi jejaring tersebut, aktor @dianparamitha, @fahrisalam, dan @projectm_org memperoleh bobot sebagai aktor perantara yang besar dibandingkan aktor lainnya

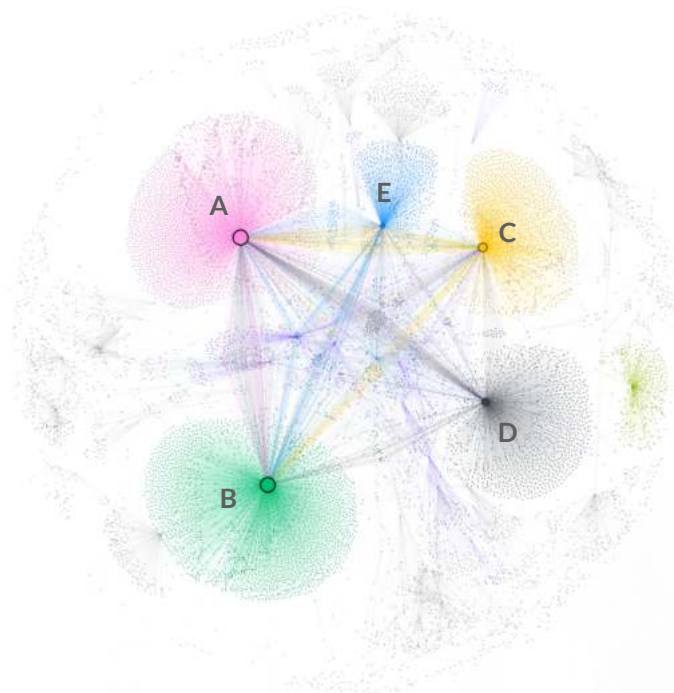
Peran ketiga aktor tersebut dapat dikatakan sangat penting karena secara tidak langsung menjadi pengendali masuk dan keluar informasi. Tanpa keberadaan ketiga aktor tersebut, informasi mengenai isu transisi energi kurang menjangkau aktor atau komunitas kecil. Temuan studi ini juga berusaha menelusuri aktor @fahrisalam yang berlatarbelakang jurnalis, yang mana ia juga merupakan Co-Founder dari @projectm_org atau dikenal dengan nama Project Multatuli sehingga dapat dikatakan, aktor @fahrisalam menjadi aktor pengendali utama pertukaran informasi kepada hampir seluruh pengguna platform media sosial Twitter terkait isu transisi energi.

C. Polarisasi Antar Komunitas

Studi ini berusaha memahami fenomena polarisasi yang terbentuk menyerupai komunitas (kluster) besar maupun kecil. Melalui hasil visualisasi ini, terdapat setidaknya empat komunitas besar yaitu A, B, C, dan D, dan sisanya adalah komunitas sedang dan/atau kecil seperti pada komunitas E dan F.

Polarisasi dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu tertentu. Dalam konteks ini, polarisasi disebabkan karena perbedaan topik atau isu yang diangkat dan diperbincangkan pada masing-masing komunitas.

Gambar 30. Visualisasi Polarisasi Antar Komunitas



Sumber: Social Network Analysis diolah oleh penulis. Data diambil dari Twitter

Topik perbincangan mengenai isu transisi energi dan lingkungan menghasilkan setidaknya empat komunitas besar. Seluruh topik tersebut mendominasi masing-masing komunitas berdasarkan aktor sentral, diantaranya

@dianparamita (A), @Mythicalforest(B), @PartaiSocmed(C), dan @GreenpaceID (D). Berikut pemetaan topik berdasarkan komunitas masing-masing aktor sentral.

Gambar 31. Pemetaan aktor topik berdasarkan komunitas aktor sentral

Komunitas

A

Aktivis Lingkungan Hidup

Isu yang dibawa:
Keadilan bagi para aktivis lingkungan yang ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Komunitas

B

Aktivis Lingkungan Hidup

Isu yang dibawa:
Dugaan penyalahgunaan lembaga dana internasional demi mendanai pihak swasta untuk membabat ribuan hektar hutan sagu di wilayah Papua.

Komunitas

C

Pegiat Media Sosial

Isu yang dibawa:
Ekspor pasir laut yang mengancam ekosistem kawasan dan krisis iklim.

Komunitas

D

Organisasi Lingkungan Hidup

Isu yang dibawa:
Menanggapi respon pemerintah yang menganggap ancaman krisis iklim sebagai komoditas dagang demi kepentingan oligarki

Dengan demikian, kajian ini berusaha mengamati sekaligus memahami jejaring antar aktor dan sentimen publik mengenai isu transisi energi. Oleh karenanya, dari hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap pemerintah belum sepenuhnya berkomitmen pada program-program

transisi energi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keputusan kebijakan yang diambil cenderung sering kali bertolakbelakang dengan ajakan atau seruan mengenai dampak lingkungan, krisis iklim, dan transisi energi.



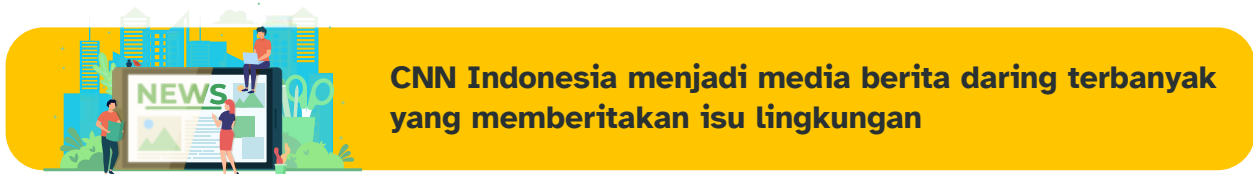


Foto: unsplash.com/tobias_tullius

Framing Media Online Terkait Isu Lingkungan

Framing Media Online Terkait Isu Lingkungan

Studi ini menunjukkan sebaran isu lingkungan dan krisis iklim di media massa online kurang mendominasi di Indonesia. Pengamatan yang dilakukan dari 1 November 2022 – 1 Mei 2023 menunjukkan terdapat 304.398 pemberitaan yang diproduksi oleh CNN Indonesia, INews, Sindo, Detik, dan Kompas. Dari total berita yang diproduksi oleh kelima media massa tersebut, sebanyak 1% (2.271) berita merupakan berita bertema lingkungan dan krisis iklim.



Gambar 32. Jumlah Berita dengan Topik Lingkungan



Sumber : diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita

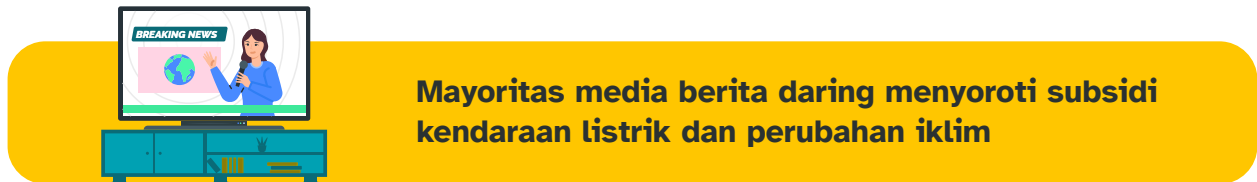
Secara umum, laporan Reuters Institute menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan media daring sebagai sumber berita dengan persentase 88%. Laporan tersebut menjelaskan lanskap statistik media massa daring di Indonesia, di mana Detikcom digunakan oleh 65% masyarakat, diikuti Kompas (48%) dan CNN Indonesia (35%)¹¹.

Studi ini menemukan bahwa CNN Indonesia dan Sindo menjadi media berita yang paling banyak memberitakan isu lingkungan dan krisis iklim (32%). Diikuti dengan media massa lain seperti Sindo (30%), INews (22%), Detik (11%), dan Kompas (5%). Dengan kata lain, jangkauan pemberitaan mengenai krisis iklim dan transisi energi masih perlu ditingkatkan sehingga perbedaan proporsi pemberitaan antara media daring satu dan lainnya tidak terlalu jauh.

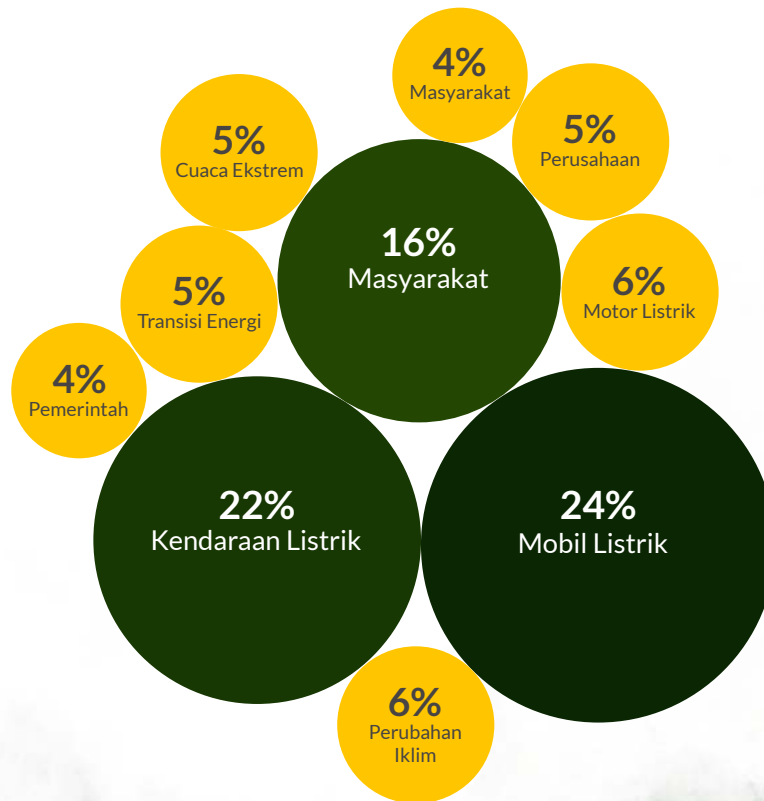
¹¹ Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Eddy, K., & Nielsen, R. K. (2022). Reuters Institute Digital News Report 2022. 53(9), 1689–1699.

Transisi energi perlu dikampanyekan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan. Transisi energi merupakan mega proyek milik rakyat sehingga demokratisasi energi harus hadir untuk mendukung proses transisi energi yang berkeadilan. Oleh karena itu, peran media massa daring sangat berperan penting dalam proses kampanye transisi energi. Terdapat potensi yang sangat besar untuk

meningkatkan kesadaran publik mengenai krisis iklim dan transisi energi melalui pendekatan ini. Selain itu, diseminasi informasi secara daring juga dapat mempercepat upaya pengkomunikasian kebijakan dan penavigasian aksi kolektif melawan krisis iklim. Harapannya, dengan upaya memobilisasi pembaca dalam jumlah besar akan memberi perhatian dan keberpihakan mengenai isu-isu lingkungan, seperti krisis iklim dan transisi energi.



Gambar 33. Kata Kunci Tema Berita Lingkungan yang Paling Banyak Diliput



Sumber data: diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan.

Hasil lain dari studi ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai isu lingkungan di Indonesia didominasi oleh tiga tema besar yaitu kendaraan listrik, perubahan iklim, dan krisis iklim. Konten pemberitaan bertema lingkungan dan krisis iklim paling banyak menyoroiti kebijakan bantuan subsidi kendaraan listrik. Melalui bantuan subsidi pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah berupaya mendorong adopsi kendaraan listrik dan mengurangi permintaan BBM. Penggunaan kendaraan listrik juga termasuk ke dalam strategi untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, dengan target adopsi kendaraan listrik roda dua dan tiga mencapai 13 juta unit dan roda empat sebanyak 2 juta unit pada tahun 2030¹².

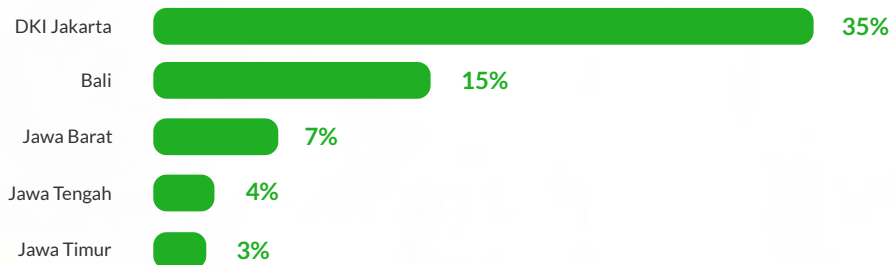
Di sisi lain, terdapat kritik terhadap kebijakan tersebut karena sangat sedikit masyarakat yang tertarik untuk membeli kendaraan listrik¹³. Diskusi di media massa daring dengan tema kendaraan listrik

secara umum seputar target sasaran kebijakan. Pada tahun 2023, pemerintah mengeluarkan Rp 1,6 triliun anggaran APBN untuk memberi stimulus masyarakat guna beralih ke kendaraan listrik. Kebijakan ini dilakukan dalam upaya mendorong percepatan transisi energi melalui kendaraan berbasis baterai. Pemberian subsidi motor listrik dapat dianggap tepat karena berpotensi mendatangkan penghasilan sehingga masyarakat menjadi lebih produktif¹⁴. Sedangkan, subsidi kendaraan listrik bagi mobil dapat dialihkan kepada pelayanan transportasi publik berbasis energi bersih. Hal tersebut dikarenakan penerima subsidi mobil listrik didominasi masyarakat golongan menengah ke atas sehingga tidak tepatsasaran. Sebagai alternatif lain, kebijakan dapat diarahkan untuk pembangunan stasiun pengisian daya yang memadai, meningkatkan pengetahuan krisis iklim, dan memunculkan kesadaran masyarakat melawan krisis iklim melalui program-program transisi energi.



Pembahasan Kendaraan Listrik masih cenderung “Jawa Sentris”

Gambar 34. Jumlah Pemberitaan bertopik Lingkungan berdasarkan tautan Provinsi



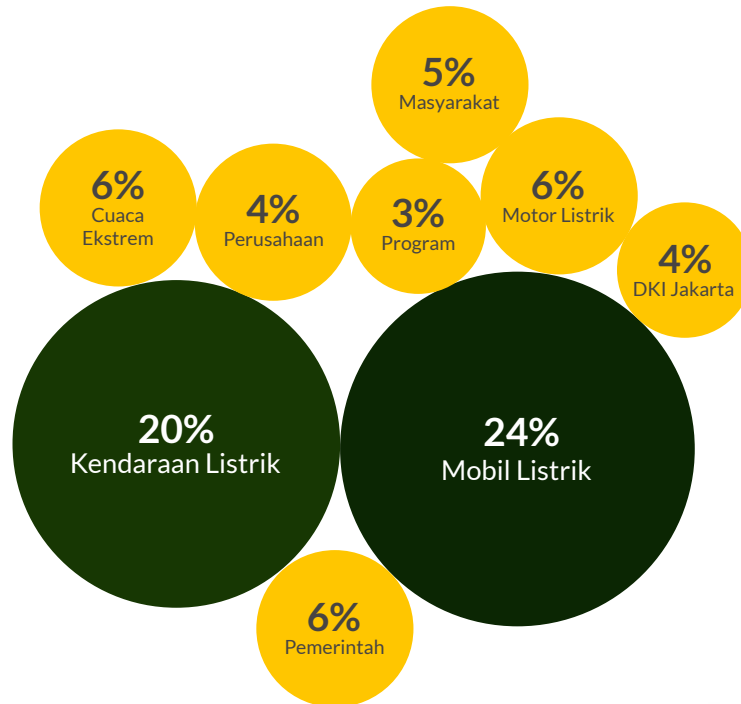
Sumber data: diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan dan dikelompokkan berdasarkan nama daerah tertaut dalam berita.

¹² <https://iesr.or.id/efektivitas-insentif-kendaraan-listrik-butuh-dukungan-pemerintah-untuk-mereformasi-kebijakan-lainnya>

¹³ CNBC Indonesia. 2023. Pemerintah Mau Rombak Subsidi Mobil Listrik, Gegara Anies?. Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230517145023-4-438218/pemerintah-mau-rombak-subsidi-mobil-listrik-gegara-anies>

¹⁴ Kompas. 2023. Penghasilan Ojol Motor Listrik, Sehari Dapat Rp 100.000, tapi Dikurangi Rp 40.000 untuk Sewa. Diakses melalui: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/17/18403121/penghasilan-ojol-motor-listrik-sehari-dapat-rp-100000-tapi-dikurangi-rp>

Gambar 35. Kata Kunci Tema Berita Lingkungan yang Paling Banyak Diliput di pulau Jawa



Sumber data: diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan dan dikelompokkan berdasarkan nama daerah 'Jawa' tertaut dalam berita.

Studi ini menunjukkan bahwa isu bertema lingkungan dan krisis iklim di pemberitaan media massa daring memiliki tautan yang erat dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa, seperti DKI Jakarta (35%), Jawa Barat (7%), Jawa Tengah (4%), dan Jawa Timur (3%). Sebanyak 57% pemberitaan yang bertautan dengan provinsi di Pulau Jawa mayoritas berbicara mengenai mobil listrik. Masyarakat di luar pulau Jawa secara tidak langsung menyadari bahwa penggunaan kendaraan listrik bukanlah kebutuhan yang mendesak. Dari sisi pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sampai saat ini belum mengindikasikan adanya pemerataan di luar Pulau Jawa sehingga topik tersebut kurang sering dibicarakan.

Secara umum terdapat dua topik besar dalam pemberitaan mengenai mobil listrik, yaitu pro dan kontra kebijakan bantuan subsidi pembelian mobil listrik dan pertumbuhan industri mobil listrik. Data ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai subsidi

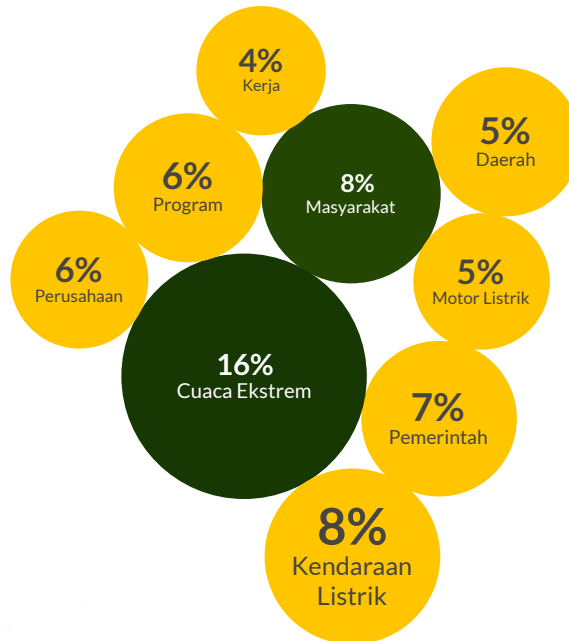
kendaraan listrik masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang notabene memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Kebijakan subsidi kendaraan listrik tidak dapat diakses oleh banyak orang. Penerima manfaat dari kebijakan tersebut hanyalah kelompok masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu, aspek keadilan dalam kebijakan penanganan perubahan iklim melalui kebijakan subsidi kendaraan listrik perlu dievaluasi kembali.

Kedua, porsi bahasan mengenai kendaraan listrik yang sangat besar menunjukkan pertumbuhan adanya daya tarik terhadap kendaraan listrik. Variasi produk kendaraan listrik baru baik motor maupun mobil cukup marak dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dengan maraknya berbagai media berita kerap meliput pameran dan *launching* produk kendaraan listrik. Selain itu, promosi kendaraan listrik juga banyak dilakukan di media massa daring dengan menyajikan keunggulan produk.



Masyarakat di luar pulau Jawa dihadapan dengan ancaman cuaca ekstrem

Gambar 36. Kata Kunci Tema Berita Lingkungan yang Paling Banyak Diliput di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua



Sumber data: diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan dan dikelompokkan berdasarkan nama daerah 'Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua' tertaut dalam berita.

Menariknya di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua tidak banyak yang memberitakan mengenai kendaraan listrik maupun transisi energi. Isu yang paling banyak diangkat oleh media massa daring adalah adalah cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan angin kencang. Hal ini semakin memperkuat dua hal, pertama, krisis iklim sedang melanda Sumatera akibat maraknya deforestasi. Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa angka deforestasi di Kalimantan dan Sumatera telah mencapai lebih dari tiga hektare dalam kurun waktu 2001-2020¹⁵. Kedua, kebijakan subsidi pembelian mobil listrik tidak menarik banyak perhatian masyarakat yang tinggal di luar pulau Jawa. Hal tersebut kemungkinan besar dikarenakan perbedaan dari aspek geografis wilayah, prioritas kebutuhan hidup, dan kemampuan

daya beli masyarakat di pulau-pulau tersebut. Selain itu, kebijakan mobil listrik dianggap tidak tepat karena keberadaan infrastruktur pengisian daya, penampungan limbah baterai, dan keterjangkauan harga kendaraan di luar Pulau Jawa yang belum memadai dengan keadaan masyarakat setempat.

Data menarik lainnya, World Bank Indonesia merilis laporan yang menyatakan bahwa standar angka kemiskinan yang digunakan oleh Indonesia masih menggunakan standar PPP (paritas daya beli) tahun 2011. Indonesia telah dinyatakan sebagai negara berpendapatan menengah atas¹⁶ sehingga standar tersebut tidak lagi menggambarkan keadaan kemiskinan saat ini. Pemerintah perlu menggunakan standar PPP terbaru tahun 2017 karena perubahan kategori status pendapatan.

¹⁵ CNN Indonesia. 2021. Greenpeace Sebut Deforestasi Kalimantan-Sumatera Capai 4 Juta Hektare, diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210180734-20-732641/greenpeace-sebut-deforestasi-kalimantan-sumatera-capai-4-juta-hektare>.

¹⁶ World Bank. 2020. World Bank Blogs: New World Bank country classifications by income level: 2020-2021.

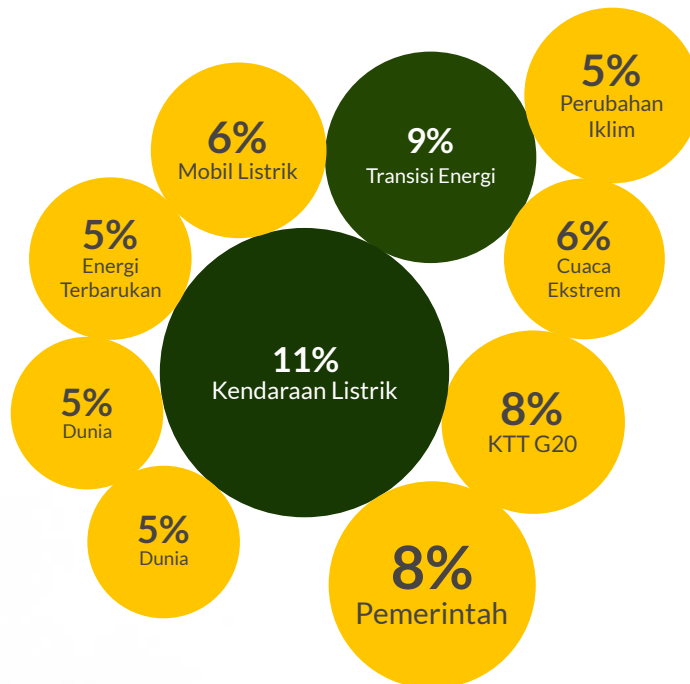
Laporan tersebut menyatakan bahwa segmen masyarakat miskin struktural menunjukkan adanya pelebaran dan segmen masyarakat yang tidak aman secara ekonomi juga meningkat signifikan¹⁷. Dari sana, prinsip keadilan menjadi tujuan pembangunan penting karena harga mobil listrik yang tinggi membuatnya hanya menjangkau golongan masyarakat yang lebih kaya, sedangkan masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin tetap terjebak dengan mobil bermesin bakar fosil yang lebih murah. Dengan demikian, subsidi yang lebih baik dapat diarahkan kepada transportasi angkutan masal yang ramah lingkungan sehingga memberikan manfaat dan pengurangan emisi karbon yang lebih signifikan.





Sirkulasi isu transisi energi masih intens di Bali dan Nusa Tenggara pasca KTT G20

Gambar 37. Kata Kunci Tema Berita Lingkungan yang Paling Banyak Diliput di Bali dan Nusa Tenggara



Sumber data: diolah penulis dari hasil scrap berita daring bertema 'lingkungan' berjumlah 2.271 berita. Berita diolah dari 5 portal berita daring nasional kemudian disaring berdasarkan kata kunci berkaitan lingkungan dan dikelompokkan berdasarkan nama daerah 'Bali dan Nusa Tenggara' tertaut dalam berita.

Selain isu kendaraan listrik yang mendominasi di Bali dan Nusa Tenggara, isu mengenai transisi energi dan energi terbarukan juga muncul. Isu ini muncul bersamaan dengan pelaksanaan KTT G20 di Bali yang salah satunya mendiskusikan transisi energi di Indonesia. Momentum KTT G20 berhasil menjadikan isu transisi energi sebagai sorotan yang tidak kalah penting dari adopsi kendaraan listrik. Implikasinya, masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara lebih banyak yang memahami agenda dari transisi energi yang ada di Indonesia. Data survei nasional yang dilakukan oleh CELIOS dan UniTrend menunjukkan bahwa masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara mayoritas lebih tahu mengenai keberadaan JETP untuk transisi energi yang berkeadilan¹⁸.





Foto: unsplash.com/markus spiske

Rekomendasi Kebijakan



Rekomendasi Kebijakan

1 Para kontestan di pemilu 2024, baik calon Presiden, maupun calon legislatif agar memiliki komitmen dan program yang riil terkait transisi energi, pencegahan deforestasi dan kebakaran hutan.

Tujuan

- ✓ Inklusifitas
- ✓ Keberlanjutan
- Daya saing

Stakeholder Utama

- ✓ KPU
- ✓ Partai Politik
- ✓ Calon Presiden
- ✓ Calon Legislatif
- ✓ Media Massa

Program	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Menyoroti gagasan calon legislatif dan calon presiden mengenai penyelesaian masalah lingkungan. • Memfasilitasi debat terbuka antar Partai Politik menangani permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan • Menginisiasi sekolah partai bagi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah mengenai transisi energi, mencegah degradasi lingkungan, dan keberlanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah partai politik yang menyelenggarakan sekolah partai • Jumlah kontestan yang terlibat dalam adu gagasan • Jumlah Parpol yang menawarkan gagsan mengenai lingkungan

2 Menempatkan isu lingkungan sebagai isu prioritas dalam agenda pemilu termasuk debat kontestan Pilpres dan pemilu legislatif.

Tujuan

- ✓ Inklusifitas
- ✓ Keberlanjutan
- Daya saing

Stakeholder Utama

- ✓ KPU
- ✓ Partai Politik
- ✓ Calon Presiden
- ✓ Calon Legislatif
- ✓ Media Massa

Program	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan komitmen transisi energi yang berkelanjutan dalam debat. • Menampilkan keberpihakan kontestan Pilpres dan pemilu legislatif mengenai pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi listrik. • Mengeksplorasi pengetahuan dan visi kontestan mengenai pengelolaan sumber daya alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pertanyaan yang berkaitan dengan isu lingkungan dalam sesi debat • Terdapat satu sesi khusus yang membahas mengenai isu lingkungan dan masa depan transisi energi • Jumlah variasi isu lingkungan yang diperdebatkan

3

Memiliki komitmen untuk mendukung alternatif skema pembiayaan proyek yang berkelanjutan secara kreatif tanpa meninggalkan aspek kehati-hatian, seperti penerbitan *green bond*, *debt for climate*, *debt restructuring*, dan kolaborasi dengan lembaga filantropis.

Tujuan

- ✔ Inklusifitas
- ✔ Keberlanjutan
- Daya saing

Stakeholder Utama

- ✔ Pemerintah
- ✔ BUMN
- ✔ Lembaga Keuangan
- ✔ Swasta

Program	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong investasi melalui instrumen keuangan berkelanjutan seperti green bonds atau green financing. • Membentuk lembaga atau tim yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak proyek secara berkelanjutan. • Mengadakan pelatihan bagi pekerja untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan partisipasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. • Memberikan insentif kepada nasabah yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan atau memiliki proyek-proyek yang ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelatihan yang dilakukan • Jumlah investasi yang disalurkan • Jumlah proyek yang mendapatkan pembiayaan

4

Mendorong pemilih rasional dengan menempatkan isu lingkungan sebagai kriteria selektif pada pemilu 2024.

Tujuan

- ✔ Inklusifitas
- Keberlanjutan
- Daya saing

Stakeholder Utama

- ✔ KPU
- ✔ Partai Politik
- Calon Presiden
- Calon Legislatif
- ✔ Media Massa

Program	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemilih rasional dengan menempatkan isu lingkungan sebagai selective criteria pada pemilu 2024 • Mendorong penyelenggara pemilu memfasilitasi perdebatan calon presiden mengenai isu lingkungan • Berkolaborasi dengan media massa untuk menyoroti perspektif kontestan pemilu mengenai lingkungan hidup • Mendorong partai politik dan kader politik yang berkontestasi untuk menyampaikan gagasan isu lingkungan di depan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah masyarakat yang terlibat • Jumlah kontestan pemilu yang berbicara isu lingkungan • Jumlah sorotan media mengenai gagasan isu lingkungan

5

Merevisi berbagai regulasi yang berdampak negatif bagi perlindungan lingkungan hidup maupun spesifik transisi energi seperti UU Cipta Kerja, Perpres 112/2022 yang masih memberikan ruang pembangunan PLTU batubara di kawasan industri.

Tujuan

- Inklusifitas
- ✔ Keberlanjutan
- Daya saing

Stakeholder Utama

- ✔ KPU
- ✔ Partai Politik
- ✔ Calon Presiden
- ✔ Calon Legislatif
- ✔ Media Massa

Program	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan konsultasi publik melibatkan berbagai pihak, termasuk LSM lingkungan, industri, akademisi, dan masyarakat umum. • Melakukan kampanye penyadaran kepada publik mengenai urgensi perubahan regulasi. • Melakukan lobbying kepada anggota parlemen dan pihak-pihak yang berwenang untuk mendukung perubahan regulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah konsultasi publik yang dilakukan • Intensivitas kampanye revisi regulasi • Jumlah akor yang mendukung ide besar revisi regulasi



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Tokopedia Tower 22th Fl.
Jl. Prof. Dr Satrio Karet Semanggi, Setiabudi.
Jakarta Selatan, Indonesia 12950

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id